

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU (SPM 1)
TERHADAP KUALITAS AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) XY**



Disusun Oleh:

Devina Nasya Sekar Alea

NIM: 22312146

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MAHASISWA

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU (SPM 1)
TERHADAP KUALITAS AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) XY

Dibuat oleh:

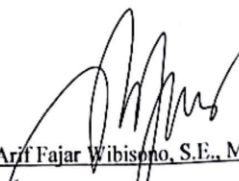
Devina Nasya Sekar Alea

Nomor Induk Mahasiswa: 22312146

Disahkan oleh:

Yogyakarta, 20 Maret 2026

Dosen Pembimbing


Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc.
133121101

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Devina Nasya Sekar Alea
NIM : 22312146
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Judul Kegiatan : Analisis Efektivitas Penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik (KAP) XY
Tempat Pelaksanaan : Km. 5, Jl. Godean No. 104, Area Sawah, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proposal magang ini disusun oleh saya sendiri dan tidak melibatkan bantuan dari pihak lain, kecuali pembimbing serta narasumber yang berkaitan.
2. Proposal magang ini belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk apapun, baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Proposal magang ini tidak memuat karya ilmiah maupun pendapat pihak lain, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan terdaftar dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 April 2025



Devina Nasya Sekar Alea

NIM: 22312146

MOTTO HIDUP

“Fake it till you make it”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga proposal magang yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik XY.” Dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan proposal magang ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis memperoleh berbagai pengalaman serta pengetahuan yang bernilai, khususnya dalam memahami teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik di dunia kerja.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal magang ini tidak terlepas dari berbagai kendala, yang tentunya tidak dapat dilalui tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, terima kasih, dan syukur, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran selama pelaksanaan magang hingga penyusunan proposal ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Anton Prabowo dan Ibu Heppy Pristiani, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa demi kelancaran penulis.
3. Subekti Triyana Atmaja, paman penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
4. Bapak Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan arahan serta bimbingan selama penyusunan proposal magang ini;
5. Pihak Kantor Akuntan Publik Dian Utami yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
6. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Dwi Susilowati Astuti, Priska Amalia, Ajeng Dwi Lestari, dan Bella Oktaviyani, yang selalu menemani, memberikan motivasi, serta menumbuhkan kepercayaan diri penulis selama masa perkuliahan;
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal magang ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang, sehingga karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Semoga proposal magang ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Yogyakarta, 9 April 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devina', with a stylized flourish above the name.

Devina Nasya Sekar Alea

NIM: 22312146

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.	2B.
	5C.
	5D.
	5BAB II
	6
KAJIAN PUSTAKA	6
A.	7B.
	Error! Bookmark not defined. B.1. Indikator-Indikator Efektivitas Audit
	9
B.1.1. Kompetensi Auditor	9
B.1.2. Independensi dan Etika Auditor	10
B.1.3. Penggunaan Waktu Personel Kunci	11
B.1.4. Pengendalian Mutu Perikatan	11
B.1.5. Hasil Reviu Mutu dan Inspeksi	12
B.1.6. Rentang Kendali Perikatan	12
B.1.7. Tata Kelola dan Organisasi KAP	12
B.1.8. Kebijakan Imbalan Jasa	13
B.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit	14
B.3. Efektivitas Audit dan Kaitannya dengan Kualitas Audit	15
C.	17C.1. Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu
	17
C.2. Persyaratan Etika Profesi dan Independensi	17
C.3. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien	18
C.4. Sumber Daya Manusia	18
C.5. Pelaksanaan Perikatan dan Supervisi	19

C.6. Pemantauan dan Remediasi	19
D.	21
	BAB III
	22
METODE PENELITIAN	22
3.1	23
	3.2
	3.3
	3.4
	BAB IV
	24
PROFIL TEMPAT MAGANG	21
4.1.	25
	4.2
	4.3
	4.3.1
	BAB V
	70
PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Kualitas audit laporan keuangan ditentukan secara fundamental oleh efektivitas sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) dan dampaknya terhadap kualitas audit di KAP XY, sebuah KAP perseorangan di Yogyakarta, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada sembilan auditor dan wawancara mendalam dengan penanggung jawab SPM 1, dilengkapi penelusuran dokumentasi atas kertas kerja pemeriksaan, dokumen SPM 1; (2) efektivitas SPM 1 dalam menjamin kepatuhan audit terhadap Standar Audit (SA); dan (3) upaya KAP XY dalam mencapai dan mempertahankan kualitas audit berdasarkan delapan indikator IAPI (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam elemen SPM 1 telah diterapkan secara terstruktur dan dapat dibuktikan secara dokumentatif. Empat elemen – tanggung jawab kepemimpinan, etika dan independensi, penerimaan klien, serta pemantauan dan remediasi - berjalan secara efektif penuh. Dua elemen – sumber daya manusia dan pelaksanaan perikatan – memerlukan penguatan akibat keterbatasan struktural KAP perseorangan, khususnya sulitnya menjaga independensi EQR pada periode *peak season*. Seluruh sembilan responden setuju terhadap semua pernyataan pada delapan indikator kualitas audit. Lima faktor pendorong dan lima faktor penghambat berhasil diidentifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skala KAP bukan penghalang bagi penerapan standar mutu yang berkualitas, sepanjang kepemimpinan dan mekanisme internal berjalan secara konsisten dan substantif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas sangat bergantung pada kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Dalam konteks ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) memegang peran yang sangat strategis, karena KAP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa audit secara profesional dan independen. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui penerapan standar yang ketat, konsisten, dan terukur dalam setiap aspek pelaksanaan audit.

Salah satu instrumen utama yang dirancang dalam menjaga dan meningkatkan kualitas jasa yang dihasilkan oleh KAP adalah Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2013. SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP dalam membangun dan memelihara sistem pengendalian mutu atas seluruh perikatan yang dijalankannya, baik perikatan asurans seperti audit dan reviu, maupun perikatan selain asuransi. Standar ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka standar profesi akuntan publik secara keseluruhan, termasuk Standar Audit dan Kode Etik Profesi yang juga ditetapkan oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Secara struktural, SPM 1 memuat enam unsur sistem pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP. Keenam unsur tersebut meliputi tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, kepatuhan terhadap ketentuan etika profesi, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, serta pemantauan dan dokumentasi atas seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Keenam unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi. Unsur kepemimpinan menegaskan bahwa pimpinan KAP harus menciptakan budaya internal yang menempatkan mutu sebagai prioritas utama. Unsur etika mengharuskan seluruh personel menjaga independensi dan integritas dalam setiap penugasan. Unsur penerimaan klien mendorong KAP untuk selektif dalam mengambil perikatan, agar tidak mengambil risiko yang melampaui kapasitas profesionalnya. Unsur sumber daya manusia mencakup rekrutmen, pelatihan, dan penugasan personel yang tepat sesuai

dengan kompleksitas perikatan. Unsur pelaksanaan perikatan mengatur bagaimana audit dijalankan melalui arahan, supervisi, dan penelaahan yang memadai. Sementara itu, unsur pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur pengendalian mutu berjalan efektif secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kualitas audit sebagai output dari sistem pengendalian mutu juga memiliki dimensi yang terukur. Berdasarkan Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP yang diterbitkan melalui Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018, terdapat delapan indikator kualitas audit, yaitu kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personel kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata Kelola KAP, serta kebijakan imbalan jasa (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018). Kedelapan indikator ini dirancang sebagai alat ukur yang komprehensif, mencakup aspek input, proses, maupun output dari proses audit, dan menjadi acuan bagi KAP dalam menyusun Laporan Transparansi Kualitas Audit kepada para pemangku kepentingan.

Keterkaitan antara SPM 1 dan kedelapan kualitas audit tersebut sangat erat. Setiap unsur SPM 1 secara langsung berkontribusi pada pemenuhan satu atau lebih indikator kualitas audit. Contohnya, unsur sumber daya manusia dalam SPM 1 mendukung terpenuhinya indikator kompetensi auditor, sementara unsur pemantauan berkaitan langsung dengan indikator hasil reviu mutu dan pengendalian mutu perikatan. Dengan demikian, efektivitas penerapan SPM 1 secara keseluruhan akan tercermin pada kualitas audit yang dihasilkan KAP. Hal ini sejalan dengan pandangan (Adha et al., 2025) yang menegaskan bahwa standar auditing dan sistem pengendalian mutu secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit, di mana auditor dituntut untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas agar setiap pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dapat terdeteksi secara optimal.

Meskipun demikian, penerapan SPM 1 di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Auditor di KAP masih berada dalam proses penyesuaian untuk mengimplementasikan sistem pengendalian mutu berdasarkan SPM 1 secara utuh dan menyeluruh (Soenjaya dan Sofian, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dengan implementasi aktual di tingkat KAP, dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas audit yang pada akhirnya dapat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Risiko tersebut bukan hanya bersifat teoritis. Beberapa kasus pelanggaran audit yang pernah terjadi di Indonesia memperlihatkan secara nyata dampak dari lemahnya sistem pengendalian mutu pada KAP. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Hanson International tahun 2016 yang melibatkan anggota Ernst & Young Global Limited, yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja serta kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fami, Bambang & Rekan, menjadi bukti konkret bahwa lemahnya pengendalian mutu dapat berujung pada opini audit yang menyesatkan dan merugikan publik (Karen et al., 2022). Banyaknya kasus yang melibatkan profesi akuntan publik membuktikan bahwa sikap independensi, skeptisisme, dan kompetensi masih kurang diterapkan oleh sebagian auditor, dan proses pemeriksaan audit yang tidak dilandasi pertimbangan dan penerapan etika profesi dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Soenjaya dan Sofian, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara SPM dan kualitas audit. (Suherman & Aryati, 2022) menemukan bahwa defisiensi implementasi SPM KAP berpengaruh signifikan terhadap defisiensi audit, sementara defisiensi desain SPM KAP dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada defisiensi audit. Temuan ini menunjukkan bahwa yang lebih krusial bukan sekadar keberadaan dokumen SPM, tetapi sejauh mana SPM tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di lingkungan KAP. Sejalan dengan hal tersebut, (Soenjaya dan Sofian, 2024) melakukan penelitian kualitatif pada KAP ABC menemukan bahwa meskipun nilai-nilai seperti independensi, kerahasiaan, dan kohesivitas telah terinternalisasi dengan baik, implementasi SPM di KAP tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga menghasilkan kualitas audit yang kurang maksimal. Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu merupakan salah satu unsur dalam menilai kualitas audit, sistem pengendalian mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap KAP karena penerapannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit suatu KAP.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat relevansi yang kuat antara efektivitas penerapan SPM 1 dengan pemenuhan delapan indikator kualitas audit yang ditetapkan oleh IAPI. Penelitian terkait topik ini masih sangat relevan untuk terus dikembangkan, mengingat masih adanya kesenjangan implementasi di tingkat KAP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik ini melalui penelitian yang berjudul

“Analisis Efektivitas Penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik XY”, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas profesi akuntan publik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan praktik aktual penerapan enam elemen wajib Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) di KAP XY?
2. Bagaimana efektivitas penerapan SPM 1 dalam menjamin Tingkat Kepatuhan Audit terhadap Standar Audit (SA) pada perikatan yang dilakukan oleh KAP XY?
3. Bagaimana upaya KAP XY dalam mencapai dan mempertahankan Kualitas Hasil Audit melalui SPM 1?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses implementasi enam elemen SPM 1 di KAP XY.
2. Menganalisis efektivitas penerapan SPM 1 dalam meningkatkan Tingkat Kepatuhan Audit di KAP XY.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci (penghambat dan pendukung) yang mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di KAP XY.

D. Manfaat Magang

1. Untuk Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman praktis yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan teori, konsep, dan metode audit yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam kegiatan audit nyata di KAP Dian Utami.
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap proses audit, termasuk pelaksanaan perikatan, penyusunan kertas kerja audit, serta penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) dalam lingkungan kerja profesional.
- c. Mengembangkan kompetensi profesional, seperti kemampuan analitis, pemecahan masalah, komunikasi profesional, serta etika pekerjaan yang diperlukan dalam profesi audit.
- d. Menambah wawasan mengenai budaya kerja KAP, struktur organisasi, serta dinamika operasional dalam proses audit, sehingga mahasiswa memiliki perspektif yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja.
- e. Memperluas jejaring profesional melalui interaksi dengan auditor, partner, dan rekan magang, yang dapat bermanfaat dalam pengembangan karier di masa depan.

2. Untuk KAP XY

- a. Mendapatkan dukungan tenaga magang yang dapat membantu proses administratif maupun teknis sederhana dalam pekerjaan audit sehingga meringankan beban kerja auditor pada periode audit tertentu
- b. Memperoleh sudut pandang baru dari mahasiswa yang membawa pengetahuan terkini dari perkuliahan, sehingga dapat memberikan masukan atau perspektif tambahan terkait praktik audit maupun dokumentasi.
- c. Menjadi sarana evaluasi terhadap implementasi SPM 1 melalui hasil penelitian mahasiswa, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu di internal KAP.
- d. Memperkuat hubungan dan kerja sama antara KAP XY dengan institusi pendidikan, khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- e. Membangun pipeline calon auditor melalui proses magang, sehingga KAP dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan kandidat potensial untuk kebutuhan rekrutmen di masa mendatang.

3. Untuk FBE UII

- a. Menjadi bukti nyata keberhasilan kurikulum dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi lingkungan kerja melalui implementasi ilmu audit pada situasi profesional.
- b. Memperkuat hubungan institusional dengan KAP Dian Utami sebagai mitra magang, sehingga membuka peluang pengembangan program kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan profesi.
- c. Menjadi sarana evaluasi dan pengembangan kurikulum melalui umpan balik dari dunia praktik terkait kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan industri.
- d. Meningkatkan reputasi fakultas sebagai institusi yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi praktis dan kesiapan kerja yang tinggi.
- e. Memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian terapan melalui hasil studi mahasiswa mengenai efektivitas implementasi SPM 1 di lingkungan KA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kualitas dan Efektivitas Audit

Audit yang berkualitas merupakan tulang kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang beredar di pasar. Tanpa jaminan kualitas dari proses audit, pengguna informasi keuangan seperti investor, kreditur, hingga regulator tidak memiliki landasan yang kuat untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

Kualitas audit merupakan konsep penting dalam profesi audit yang berkaitan dengan hasil dan proses audit itu sendiri. Menurut (Prastika & Widodo, 2020), kualitas audit diartikan sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi serta melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Kemampuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh independensi auditor, kompetensi, serta penerapan *due professional care* selama proses audit. Dengan demikian, audit yang berkualitas tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap standar, tetapi juga dari sejauh mana auditor mampu menghasilkan laporan audit yang andal, objektif, dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam ranah profesi akuntan publik, kualitas audit dipahami sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material dan keberanian untuk melaporkannya secara jujur tanpa tekanan dari pihak manapun. Pada hasil penelitiannya, (Soenjaya dan Sofian, 2024) menegaskan bahwa kualitas audit tidak cukup hanya diukur dari keahlian teknis semata, melainkan juga ditentukan oleh independensi, skeptisisme profesional, dan komitmen etika yang dijaga konsisten sepanjang proses perikatan.

Di Indonesia, persoalan kualitas audit telah menjadi perhatian serius regulator, terutama setelah terungkapnya sejumlah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik. Pada studi yang dilakukan (Karen et al., 2022), beliau mendokumentasikan kasus PT Garuda Indonesia, di mana pelanggaran prinsip independensi auditor berkontribusi pada lolosnya rekayasa laporan keuangan dari proses pemeriksaan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kualitas audit bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan etika dan tata kelola yang memiliki dampak luas bagi kepentingan publik. Sejalan dengan hal tersebut, (Soenjaya dan Sofian, 2024) menambahkan bahwa pelanggaran serupa yang ditemukan di beberapa KAP lain di

Indonesia konsisten mengarah pada satu akar masalah yang sama, yaitu lemahnya sistem pengendalian mutu internal yang seharusnya menjaga perilaku auditor tetap sesuai standar.

Efektivitas secara umum didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu sistem, kebijakan, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bukan sekadar apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan, melainkan seberapa jauh kegiatan tersebut menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan awalnya. Sementara itu, efektivitas dalam konteks implementasi standar profesional merujuk pada sejauh mana kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan benar-benar mampu menghasilkan output sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks KAP, efektivitas tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya dokumen kebijakan mutu, melainkan dari seberapa jauh kebijakan tersebut mengubah perilaku nyata auditor di lapangan. Apabila diterapkan dalam konteks SPM 1, efektivitas berarti bahwa keenam elemen yang diwajibkan oleh IAPI yaitu tanggung jawab kepemimpinan atas mutu, persyaratan etika profesi dan independensi, penerimaan dan keberlanjutan klien, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan dan supervisi hingga pemantauan dan remediasi tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga dijalankan secara konsisten dalam praktek audit sehari-hari dan terbukti menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Dalam studinya, (Adha et al., 2025) menemukan bahwa KAP yang menerapkan SPM dan standar auditing secara efektif adalah bukti nyata bahwa sistem pengendalian mutu yang dimiliki mampu memengaruhi perilaku auditor di lapangan dan berujung pada opini audit yang memenuhi standar profesional yang berlaku. Sehingga, efektivitas implementasi standar merupakan jembatan antara regulasi yang tertulis dan kualitas audit yang dirasakan di lapangan.

Hubungan antara kualitas audit dan efektivitas pada dasarnya bersifat saling berkesinambungan. Kualitas audit yang tinggi tidak akan terwujud tanpa implementasi standar yang efektif, dan implementasi standar yang efektif hanya bermakna jika berujung pada peningkatan kualitas audit yang nyata. Selain itu, (Hendang Tanusdjaja, 2021) juga membuktikan bahwa penerapan standar auditing, SPM, dan kode etik secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas jasa audit untuk mengonfirmasi bahwa efektivitas implementasi standar secara simultan menjadi prasyarat terwujudnya audit yang berkualitas. Temuan oleh (Renaldi & Mawardi, 2021) memperkuat hal ini dengan menemukan bahwa kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional auditor secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas audit,

mengindikasikan bahwa kualitas audit bersifat multidimensi dan tidak dapat dicapai hanya melalui pemenuhan satu aspek semata. Berdasarkan tinjauan komprehensif selama lima tahun terakhir, (Ekonomi, 2025) juga menegaskan bahwa independensi dan skeptisisme auditor konsisten menjadi prediktor kualitas audit yang paling kuat, sekaligus menjadi elemen yang paling rentan dikompromikan dalam praktik. Dengan demikian, kajian terkait dengan efektivitas implementasi SPM 1 sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kualitas audit di KAP yang diteliti.

Secara konkret, laporan audit yang berkualitas dapat dicirikan dari beberapa hal yang dapat diamati. Pertama, opini yang diberikan auditor mencerminkan kondisi laporan keuangan klien yang sesungguhnya, bebas dari salah saji material dan tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak manapun. Kedua, proses audit yang menghasilkan laporan tersebut dilandasi oleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan standar audit yang berlaku. Ketiga, seluruh pertimbangan profesional yang diambil auditor selama proses perikatan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat diverifikasi oleh pihak lain jika diperlukan. Keempat, auditor yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kompleksitas perikatan dan menjaga independensinya sepanjang proses audit berlangsung.

Kualitas audit memiliki dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan yaitu dimensi kompetensi, yaitu kemampuan teknis untuk mendeteksi masalah, dan dimensi integritas, yaitu keberanian untuk melaporkannya secara jujur. Kedua dimensi ini hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem pengendalian mutu yang efektif di tingkat KAP, yang memastikan setiap auditor bekerja dalam lingkungan yang mendorong kejujuran profesional dan tidak memberikan ruang bagi kompromi terhadap standar.

Efektivitas audit merujuk pada kemampuan proses audit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan temuan yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan. Dalam lingkup pengendalian mutu KAP, efektivitas audit internal mencerminkan sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu mendeteksi kelemahan sistem, mendorong kepatuhan terhadap prosedur, dan memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut (Suherman & Aryati, 2022) lemahnya sistem pengendalian mutu di KAP skala kecil berdampak langsung pada meningkatnya defisiensi dalam proses audit. Kondisi ini terjadi karena KAP yang lebih kecil umumnya tidak memiliki infrastruktur audit internal yang cukup untuk mendeteksi dan mengoreksi kelemahan sejak dini. Sebaliknya, KAP yang secara konsisten menjalankan mekanisme pengawasan internal

terbukti menghasilkan audit dengan tingkat defisiensi yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas audit internal bukan sekadar pelengkap sistem, melainkan komponen inti yang menentukan kualitas output audit secara keseluruhan.

Untuk dapat menilai apakah penerapan SPM 1 di suatu KAP berjalan secara efektif, diperlukan kerangka analisis yang jelas. Dalam penelitian ini, efektivitas penerapan SPM 1 dianalisis melalui tiga pertanyaan pokok: pertama, apakah elemen-elemen SPM 1 benar-benar diterapkan dalam praktek, bukan sekadar terdokumentasi secara formal; kedua, apakah penerapan tersebut menghasilkan kepatuhan auditor terhadap standar audit yang berlaku; dan ketiga, apakah kepatuhan tersebut pada akhirnya berujung pada kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, efektivitas audit juga bergantung pada sejauh mana hasil temuan audit internal benar-benar ditindaklanjuti dalam organisasi. Hal ini didukung oleh (Syahrir et al., 2025) bahwa pada KAP yang menerapkan SPM berbasis nilai, setiap temuan pemantauan internal tidak hanya dijadikan bahan evaluasi, tetapi juga diinternalisasi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi. Pendekatan ini menghasilkan siklus perbaikan yang jauh lebih efektif dibandingkan KAP yang hanya menjalankan inspeksi sebagai formalitas administratif tanpa tindak lanjut yang bermakna.

B. 1. Indikator-Indikator Efektivitas Audit

Sebagaimana diatur oleh (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018) melalui Panduan Indikator Kualitas Audit menetapkan delapan indikator resmi sebagai tolak ukur kualitas dan efektivitas audit pada KAP di Indonesia. Kedelapan indikator ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara bersama-sama mencerminkan kondisi sistem audit dari hulu ke hilir. Masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

B. 1.1. Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor merupakan indikator pertama sekaligus fondasi paling mendasar dari kualitas audit. Kompetensi mencakup pengetahuan teknis di bidang akuntansi dan auditing, kemampuan menerapkan standar profesional dalam berbagai situasi perikatan, serta pemahaman yang memadai terhadap industri dan bisnis klien yang diaudit. Tanpa kompetensi yang cukup, auditor tidak akan mampu mengenali risiko yang sesungguhnya ada dalam laporan keuangan yang diperiksa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Soenjaya dan Sofian, 2024) membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang kompeten lebih mampu mengidentifikasi risiko salah saji secara akurat, memilih prosedur audit yang tepat sasaran, dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Dalam kerangka SPM 1, kewajiban KAP untuk memastikan kompetensi personilnya merupakan bagian dari elemen sumber daya manusia, menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi auditor adalah investasi langsung terhadap kualitas audit. Temuan oleh (Arnita et al., 2023) dalam penelitiannya menguraikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, di mana auditor yang telah menangani lebih banyak jenis perikatan cenderung lebih mampu mengidentifikasi risiko yang tidak tampak secara eksplisit dalam laporan keuangan klien. Selain itu, (Alvin et al., 2023) juga menambahkan bahwa kombinasi pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta dan Bekasi, menegaskan bahwa ketiga dimensi tersebut harus dikembangkan secara bersamaan dan tidak dapat saling menggantikan.

B. 1.2. Independensi dan Etika Auditor

Independensi dan etika merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam profesi audit. Independensi memastikan auditor bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun dalam mengambil pertimbangan profesional, sementara etika mengatur bagaimana auditor seharusnya berperilaku ketika menghadapi konflik kepentingan, tekanan klien, atau situasi yang berpotensi mencederai objektivitasnya. Keduanya merupakan prasyarat agar opini audit yang dihasilkan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Karen et al., 2022) mendokumentasikan secara nyata bagaimana pelanggaran prinsip independensi dalam kasus PT Garuda Indonesia menyebabkan distorsi laporan keuangan lolos dari pemeriksaan audit dan merugikan banyak pihak. Hal ini didukung oleh temuan (Soenjaya dan Sofian, 2024) dengan membuktikan bahwa etika profesi bertindak sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit. Seorang auditor yang kompeten sekalipun tidak akan menghasilkan audit yang berkualitas apabila etika dan independensinya terganggu. Secara empiris, (Samosir et al., 2022) mendapati bahwa kompetensi dan independensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di DKI Jakarta, dan independensi terbukti menjadi faktor yang

lebih dominan pengaruhnya dibandingkan kompetensi semata ketika keduanya diuji secara simultan. Kondisi ini diperjelas dengan temuan (Juliyanti Sidik Tjan et al., 2024) mengenai peran fee audit sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara independensi, skeptisisme profesional, dan kualitas audit, mengindikasikan bahwa kecukupan imbalan jasa bukan hanya persoalan finansial melainkan juga kondisi yang menopang independensi auditor secara struktural.

B. 1.3. Penggunaan Waktu Personel Kunci

Indikator ketiga menyoroti seberapa besar porsi waktu yang benar-benar dicurahkan oleh personil inti seperti partner dan auditor senior dalam proses perikatan. Sebagaimana diatur oleh (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018) yang menetapkan indikator ini sebagai cerminan komitmen nyata KAP terhadap kualitas audit yaitu keterlibatan langsung personil berpengalaman dalam setiap tahap perikatan, bukan hanya hadir pada saat penandatanganan laporan akhir, merupakan salah satu penentu proses audit yang dilaksanakan.

Dalam praktiknya, KAP yang menanggung beban perikatan sangat besar namun memiliki jumlah partner terbatas sering kali menghadapi dilema seperti partner tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat secara substantif dalam setiap perikatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas supervisi dan pertimbangan profesional di tingkat perikatan. Hasil analisis mendalam oleh (Adha et al., 2025) menegaskan bahwa distribusi waktu personel kunci yang tidak proporsional merupakan salah satu faktor yang menghambat efektivitas penerapan SPM 1 di KAP skala menengah. Sejalan dengan itu, (Syahputra et al., 2024) turut menambahkan bahwa audit tenure yang terlalu Panjang berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena menciptakan kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien, sehingga pengaturan rotasi personel kunci merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga objektivitas dan efektivitas perikatan.

B. 1.4. Pengendalian Mutu Perikatan

Pengendalian mutu perikatan merupakan mekanisme yang diterapkan secara langsung dalam setiap perikatan audit, mencakup efektivitas review berjenjang dari staf ke auditor senior hingga ke partner, konsistensi penerapan prosedur audit yang telah direncanakan, serta ketersediaan mekanisme konsultasi teknis ketika tim menemukan

persoalan yang sulit. Indikator ini pada dasarnya mengukur seberapa ketat pengawasan internal diterapkan dalam proses audit yang sedang berjalan.

Dalam penelitiannya, (Hendang Tanusdjaja, 2021) menemukan bahwa penerapan SPM yang efektif pada dimensi ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas jasa audit yang dihasilkan. Ketika review berjenjang berjalan dengan sungguh-sungguh dan bukan sekadar formalitas, kesalahan dalam prosedur audit dapat dideteksi dan dikoreksi sebelum laporan diterbitkan. Sehubungan dengan hal ini, (Suherman & Aryati, 2022) menambahkan bahwa kelemahan pada indikator pengendalian mutu perikatan merupakan salah satu defisiensi yang paling sering ditemukan dalam hasil inspeksi IAPI terhadap KAP skala menengah dan kecil. Analisis mendalam oleh (Allo & Nugroho, 2021) menegaskan bahwa sistem pengendalian mutu KAP memiliki hubungan positif dengan etika profesi dan skeptisisme profesional auditor, mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian mutu perikatan yang efektif tidak hanya meningkatkan konsistensi prosedur tetapi juga membentuk perilaku auditor yang lebih berintegritas. Dampak teknis dari sistem ini kemudian diuraikan oleh (Alvina Hanifa Rahmawati & Nibras Anny Khabibah, 2024) berdasarkan studi kasus pada KAP Purba Lauddin & Rekan bahwa kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu dengan standar IAPI berpengaruh langsung pada konsistensi tata kelola dan kualitas dokumentasi perikatan yang dihasilkan.

B. 1.5. Hasil Reviu Mutu dan Inspeksi

Indikator kelima mencerminkan kemampuan KAP dalam mengevaluasi dirinya sendiri melalui kegiatan reviu mutu internal maupun inspeksi eksternal. Hasil reviu atau inspeksi ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan cermin jujur yang menunjukkan di mana titik-titik kelemahan dalam sistem pengendalian mutu berada. KAP yang terbuka terhadap hasil reviu dan segera mengambil Langkah perbaikan menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas audit secara berkelanjutan.

Uraian oleh (Suherman & Aryati, 2022) berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa KAP yang tidak menjalankan mekanisme reviu mutu secara serius cenderung mengakumulasi defisiensi yang tidak terdeteksi, hingga berdampak signifikan pada kualitas output audit. Penelitian tersebut membuktikan bahwa KAP yang tidak menjalankan mekanisme reviu mutu secara serius cenderung mengakumulasi defisiensi yang tidak terdeteksi, hingga berdampak signifikan pada

kualitas output audit. Sedangkan, KAP yang menerapkan SPM berbasis nilai, hasil reviu mutu tidak hanya dijadikan bahan koreksi teknis tetapi juga diinternalisasi sebagai bahan pembelajaran seluruh tim, sehingga menghasilkan perbaikan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

B. 1.6. Rentang Kendali Perikatan

Rentang kendali perikatan mengukur rasio antara jumlah perikatan yang menjadi tanggung jawab seorang partner atau manajer dengan kapasitas pengawasan yang realistis dapat ia lakukan. Indikator ini penting karena supervisi yang efektif hanya dapat terwujud apabila personil yang bertanggung jawab memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk menelaah pekerjaan tim secara substantif, bukan sekadar menandatangani dokumen secara formal.

Menurut (Suherman & Aryati, 2022) KAP skala kecil dan menengah paling rentan terhadap masalah rentang kendali yang terlalu lebar, di mana satu partner seringkali harus mengawasi belasan perikatan secara bersamaan. Kondisi ini secara langsung menekan kedalaman supervisi yang dapat diberikan, sehingga risiko lolosnya kesalahan dalam kertas kerja audit menjadi lebih tinggi. (Adha et al., 2025) menegaskan bahwa pengelolaan rentang kendali yang tepat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan KAP yang tidak dapat diabaikan.

B. 1.7. Tata Kelola dan Organisasi KAP

Tata kelola dan struktur organisasi KAP merupakan fondasi institusional yang menentukan apakah sistem pengendalian mutu dapat bekerja secara efektif. Indikator ini mencakup kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab antar personal, transparansi proses pengambilan keputusan strategis, serta keberadaan kebijakan internal yang mendukung independensi dan objektivitas auditor dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penelitiannya, menemukan bahwa tata kelola yang baik turut berkontribusi pada peningkatan kualitas jasa audit melalui penguatan sistem pengendalian mutu secara keseluruhan.

B. 1.8. Kebijakan Imbalan Jasa

Indikator kedelapan menyoroti kecukupan dan kewajaran fee audit yang ditetapkan oleh KAP. Kebijakan imbalan jasa yang baik harus mencerminkan kompleksitas perikatan, risiko yang melekat pada klien, serta sumber daya yang

dibutuhkan untuk melaksanakan audit secara memadai. Fee yang terlalu rendah sering kali akibat persaingan harga yang tidak sehat antar KAP sehingga menciptakan tekanan implisit bagi auditor untuk memangkas prosedur demi menekan biaya, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas audit.

Berdasarkan pengamatan mendalam, (Adha et al., 2025) menegaskan bahwa kebijakan imbalan jasa yang tidak realistis menjadi salah satu hambatan struktural yang menghambat implementasi SPM secara optimal, karena auditor tidak memiliki sumber daya waktu dan tenaga yang cukup untuk menjalankan seluruh prosedur audit sebagaimana mestinya. Dalam tinjauannya mengenai imbalan jasa, (Suherman & Aryati, 2022) mencatat bahwa tekanan fee rendah paling besar dirasakan oleh KAP skala menengah yang bersaing ketat untuk mempertahankan klien, sehingga penetapan kebijakan imbalan jasa yang berorientasi pada kualitas merupakan tantangan sekaligus keharusan bagi KAP yang ingin menjaga integritas auditnya. Temuan dari (Violetta Rifqi Agastya & Vania Belva Abidah Ardelia, 2024) kemudian mempertegas bahwa *fee audit*, *audit tenure*, dan reputasi KAP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur, di mana fee audit yang memadai terbukti menjadi prasyarat bagi auditor untuk menjalankan seluruh prosedur audit yang diperlukan secara penuh. Pandangan ini sejalan dengan simpulan (Empiris et al., 2025) bahwa independensi auditor, audit tenure, fee audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP berpengaruh secara berkesinambungan terhadap kualitas audit, menegaskan bahwa kebijakan imbalan jasa tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rotasi dan independensi yang menjadi bagian penting dari sistem pengendalian mutu KAP.

B. 2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit

Efektivitas audit tidak muncul dengan sendirinya; ia merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang bekerja secara simultan dalam lingkungan organisasi KAP. Faktor pertama dan paling mendasar adalah kompetensi auditor. Auditor yang memiliki pengetahuan teknis memadai, pemahaman mendalam terhadap bisnis klien, dan pengalaman kerja yang relevan cenderung mampu menjalankan prosedur audit secara lebih efektif. Dalam studinya, (Soenjaya dan Sofian, 2024) memberikan penekanan bahwa kompetensi, ketika dikuatkan oleh etika profesi yang kuat, menghasilkan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kualitas audit dibandingkan ketika kompetensi berdiri sendiri tanpa dukungan integritas moral.

Faktor kedua adalah independensi dan objektivitas. Sebagaimana dibuktikan oleh (Karen et al., 2022) melalui penelitiannya, ketika independensi auditor terkompromikan oleh kepentingan tertentu, maka seluruh efektivitas proses audit menjadi tidak bermakna meski secara teknis sudah memenuhi prosedur. Ini menunjukkan bahwa independensi bukan sekadar persyaratan formal, melainkan kondisi yang harus dijaga secara aktif melalui mekanisme pengendalian mutu yang memadai.

Faktor ketiga adalah kepemimpinan dan dukungan organisasi. Terkait faktor ini, (Adha et al., 2025) mendapati bahwa pada KAP dengan kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap mutu, implementasi SPM menghasilkan peningkatan kualitas audit yang terukur. Sebaliknya, tanpa dukungan kepemimpinan yang aktif, kebijakan mutu yang bagus sekalipun cenderung tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh auditor di lapangan. Faktor keempat adalah ketersediaan sistem dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini diperkuat oleh temuan (Suherman & Aryati, 2022) yang menunjukkan bahwa KAP yang memiliki sistem pengendalian mutu yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik menghasilkan defisiensi audit yang lebih rendah, karena auditor memiliki panduan yang jelas dalam setiap tahap perikatan. Skeptisisme profesional dan pengalaman auditor juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit, di mana auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi cenderung lebih teliti dalam mengevaluasi bukti audit dan tidak mudah menerima representasi manajemen klien tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas audit tidak hanya bergantung pada prosedur formal yang tertulis, tetapi juga pada sikap dan orientasi profesional yang dimiliki oleh setiap auditor yang terlibat dalam suatu perikatan.

B.3. Efektivitas Audit dan Kaitannya dengan Kualitas Audit

Efektivitas audit dan kualitas audit merupakan dua konsep yang berkaitan erat namun tidak identik. Efektivitas audit merujuk pada sejauh mana proses audit dijalankan sesuai standar, sementara kualitas audit merujuk pada nilai dan keandalan hasil akhirnya. Dalam praktik, keduanya membentuk hubungan kausal yang linier: proses audit yang efektif menghasilkan output audit yang berkualitas, sedangkan audit yang tidak efektif hampir pasti menghasilkan output yang tidak dapat diandalkan.

Menurut (Hendang Tanusdjaja, 2021) dalam penelitiannya menguraikan bahwa kepatuhan terhadap standar auditing dan SPM sebagai cerminan efektivitas proses yang

berpengaruh langsung terhadap kualitas jasa audit yang dihasilkan. Ini berarti setiap upaya meningkatkan kualitas audit harus dimulai dari perbaikan efektivitas proses, bukan hanya dari perbaikan output. Hasil pengamatan oleh (Adha et al., 2025) turut melengkapi pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa hanya ketika SPM diterapkan secara efektif dan konsisten maka kualitas audit yang sesungguhnya dapat terwujud.

Dalam kerangka SPM 1 secara khusus, efektivitas implementasi mencakup tiga dimensi evaluasi yang saling berkaitan: dimensi input yang mencakup kesiapan sumber daya dan kebijakan; dimensi proses yang mencakup pelaksanaan perikatan, supervisi, dan dokumentasi; serta dimensi output yang mencakup kualitas opini dan kepatuhan terhadap standar. KAP yang mampu menjaga efektivitas pada ketiga dimensi ini secara bersamaan menghasilkan kualitas audit yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Standar Pengendalian Mutu (SPM 1)

Standar Pengendalian Mutu No. 1 (SPM 1) yang ditetapkan oleh IAPI merupakan adopsi dari International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) yang berlaku secara internasional. Standar ini mewajibkan setiap KAP untuk merancang dan memelihara sistem pengendalian mutu yang mampu memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh personel KAP mematuhi standar profesi, ketentuan etika, serta regulasi yang berlaku dalam setiap perikatan yang dijalankan. Menurut analisis mendalam yang dilakukan oleh (Adha et al., 2025) menegaskan bahwa penerapan SPM 1 yang menyeluruh merupakan salah satu penentu utama kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP, karena standar ini mengatur fondasi sistem mutu dari hulu ke hilir proses perikatan.

SPM 1 terdiri atas enam elemen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang tidak dapat dijalankan secara parsial. Keenam elemen tersebut adalah tanggung jawab kepemimpinan atas mutu, persyaratan etika profesi, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan dan remediasi. KAP yang berhasil mengintegrasikan keenam elemen ini sebagai bagian dari nilai dan budaya organisasi ini menghasilkan sistem mutu yang jauh lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan di lapangan.

C.1. Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu

Elemen pertama SPM 1 menempatkan pimpinan KAP sebagai pemegang tanggung jawab utama atas mutu seluruh perikatan yang dijalankan. Prinsipnya bertumpu pada keyakinan bahwa kualitas audit tidak dapat dibangun dari bawah jika tidak ada komitmen yang nyata dari puncak organisasi. Pimpinan KAP bertanggung jawab menetapkan arah strategis, memprioritaskan mutu di atas pertimbangan komersial semata, serta membangun iklim kerja yang mendorong auditor untuk menjalankan setiap prosedur dengan penuh integritas.

Pada analisis yang dilakukan oleh (Adha et al., 2025), beliau menguraikan bahwa komitmen kepemimpinan merupakan faktor moderasi yang menentukan apakah penerapan SPM benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas audit yang terukur. KAP dengan kepemimpinan yang aktif terlibat dalam pengawasan mutu terbukti menghasilkan implementasi SPM yang lebih efektif. Sehingga, pimpinan KAP yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai mutu dalam perilaku sehari-harinya, hal ini menular ke seluruh jajaran auditor dalam membentuk budaya mutu yang berkelanjutan.

C.2. Persyaratan Etika Profesi dan Independensi

Elemen kedua SPM 1 mengatur kewajiban KAP untuk memastikan bahwa seluruh personilnya mematuhi prinsip-prinsip etika profesi, dengan penekanan khusus pada pengelolaan ancaman terhadap independensi. KAP wajib memiliki prosedur yang memungkinkan identifikasi dini potensi konflik kepentingan, hubungan finansial dengan klien, atau tekanan yang dapat mengganggu objektivitas auditor dalam menjalankan perikatan.

Urgensi elemen ini menjadi sangat jelas ketika melihat konsekuensi nyata dari kegagalannya. Menurut penelitian (Karen et al., 2022), beliau mendokumentasikan bagaimana pelanggaran prinsip independensi dalam kasus PT Garuda Indonesia tidak hanya menyebabkan distorsi laporan keuangan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik secara luas. Selain itu, (Soenjaya dan Sofian, 2024) memperkuat temuan ini dengan membuktikan bahwa etika profesi berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara kompetensi auditor dan kualitas audit.

C.3. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Elemen ketiga SPM 1 mengatur prosedur yang harus dilalui KAP sebelum menerima klien baru maupun melanjutkan perikatan yang sudah berjalan. Evaluasi ini mencakup penilaian integritas manajemen klien, kompleksitas risiko perikatan, potensi ancaman terhadap independensi, serta kesesuaian antara kapasitas sumber daya KAP dengan tuntutan perikatan yang akan dijalankan. Tujuannya adalah memastikan bahwa KAP hanya terlibat dalam perikatan yang dapat dikelola secara profesional dan sesuai standar.

Dalam tinjauannya mengenai kapasitas sumber daya, (Suherman & Aryati, 2022) menjelaskan bahwa KAP yang mengabaikan atau memperlemah prosedur penerimaan klien cenderung mengakumulasi perikatan berisiko tinggi yang melampaui kapasitas sumber daya mereka. Hal ini terutama relevan bagi KAP menengah yang kerap menghadapi tekanan untuk menerima sebanyak mungkin klien demi keberlangsungan bisnis, sementara kapasitas personel berpengalaman yang dimiliki tidak bertumbuh secepat volume perikatan. Untuk memitigasi hal tersebut, (Hendang Tanusdjaja, 2021) menambahkan bahwa seleksi klien yang ketat merupakan bagian dari penerapan standar pengendalian mutu yang berpengaruh terhadap kualitas jasa audit yang dihasilkan.

C.4. Sumber Daya Manusia

Elemen keempat SPM 1 menekankan kewajiban KAP untuk memastikan bahwa setiap personel yang terlibat dalam perikatan memiliki kompetensi, pengalaman, dan pelatihan yang sesuai dengan tingkat kompleksitas perikatan yang ditangani. Pengelolaan SDM yang efektif dalam konteks ini bukan hanya soal rekrutmen, melainkan juga menyangkut distribusi beban kerja yang proporsional, supervisi berjenjang yang memadai, serta program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Soenjaya dan Sofian, 2024) membuktikan bahwa kompetensi auditor merupakan salah satu prediktor utama kualitas audit, dan pengaruhnya semakin kuat ketika kompetensi tersebut berjalan beriringan dengan etika profesi yang kokoh. Ini berarti investasi KAP dalam pengembangan SDM yang dilakukan melalui pelatihan teknis, pendampingan auditor junior, dan rotasi penugasan yang terencana secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas output audit. Hal ini juga didukung oleh (Suherman & Aryati, 2022) dalam analisis

mendalam bahwa KAP skala kecil dan menengah yang menghadapi keterbatasan jumlah auditor berpengalaman menjadi lebih rentan terhadap defisiensi audit, menegaskan bahwa pengelolaan SDM yang strategis merupakan tantangan kritis bagi KAP di luar kelompok Big Four.

C.5. Pelaksanaan Perikatan dan Supervisi

Pelaksanaan perikatan dan Supervisi merupakan elemen SPM 1 yang paling langsung bersentuhan dengan proses audit di lapangan. Elemen ini mengatur standar yang harus dipenuhi dalam setiap tahap perikatan: dari perencanaan audit dan penilaian risiko, pelaksanaan prosedur substantif dan pengujian pengendalian, supervisi dan review berjenjang, hingga dokumentasi yang mencerminkan pertimbangan profesional yang digunakan selama proses audit.

Pada penelitiannya, (Hendang Tanusdjaja, 2021) menemukan bahwa kepatuhan terhadap standar auditing dalam pelaksanaan perikatan merupakan salah satu faktor yang paling kuat memengaruhi kualitas jasa audit yang dihasilkan. Sementara itu, (Adha et al., 2025) menegaskan bahwa hanya ketika prosedur pelaksanaan perikatan dijalankan secara konsisten dan sesuai standar maka sistem pengendalian mutu dapat dikatakan berjalan efektif. Dokumentasi yang lengkap dan akurat menjadi bukti nyata bahwa proses audit telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sekaligus melindungi KAP dari risiko hukum apabila kualitas audit dipersoalkan di kemudian hari.

C.6. Pemantauan dan Remediasi

Elemen keenam SPM 1 menggarisbawahi pentingnya mekanisme evaluasi diri yang berkelanjutan dalam organisasi KAP. Pemantauan dilakukan melalui inspeksi internal terhadap perikatan yang telah selesai, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur mutu, serta tindak lanjut atas temuan yang diperoleh. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian mutu tidak menjadi statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan risiko, standar, dan kondisi lingkungan.

Analisis mendalam oleh (Suherman & Aryati, 2022) menguraikan bahwa KAP yang tidak memiliki mekanisme pemantauan yang efektif cenderung mengakumulasi defisiensi sistem mutu yang tidak terdeteksi, hingga akhirnya berujung pada kegagalan audit yang lebih serius. Sebaliknya, KAP yang menjalankan pemantauan sebagai bagian dari nilai organisasi menghasilkan siklus perbaikan berkelanjutan yang secara konsisten meningkatkan kualitas audit dari waktu ke waktu. Temuan-temuan ini

menegaskan bahwa elemen pemantauan dan remediasi adalah mekanisme koreksi diri yang menjaga relevansi dan efektivitas seluruh sistem SPM 1 dalam jangka panjang.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara penerapan standar pengendalian mutu dan kualitas audit telah dilakukan dari berbagai sudut pandang dan pendekatan metodologis. Tabel berikut merangkum tiga penelitian yang paling relevan dengan fokus kajian penelitian ini dan menjadi landasan perbandingan dalam pengembangan analisis.

Tabel 1. Ringkasan Kajian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Independent	Objek Kajian	Hasil Kajian
1.	(Hendang Tanusdjaja, 2021)	Standar Auditing, SPM, Kode Etik	Auditor KAP di Jakarta	SPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas jasa audit; bersama standar auditing dan kode etik, ketiganya secara simultan menjelaskan variasi kualitas audit secara memadai.
2.	(Suherman & Aryati, 2022)	Defisiensi SPM, Ukuran KAP	KAP terdaftar IAPI	Defisiensi sistem pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap defisiensi audit; KAP berukuran kecil lebih rentan terhadap celah mutu dibandingkan KAP besar.
3.	(Alvina Hanifa Rahmawati & Nibras Anny Khabibah, 2024)	Penerapan SPM dan Tata Kelola KAP	KAP Purba Lauddin & Rekan	Kesesuaian penerapan SPM dengan standar IAPI berpengaruh langsung pada konsistensi tata Kelola dan kualitas dokumentasi perikatan serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kasus.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga penelitian: ketiganya secara konsisten menemukan bahwa penerapan SPM yang efektif berpengaruh positif terhadap kualitas audit, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Namun, gap yang belum terjawab oleh ketiga penelitian tersebut adalah bagaimana dinamika implementasi SPM 1 berlangsung secara nyata di lapangan pada KAP menengah dengan konteks spesifik seperti KAP XY sehingga celah inilah yang menjadi justifikasi dan kontribusi utama penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena menitikberatkan proses analisis pada penalaran deduktif dan induktif, serta mengkaji dinamika hubungan antar fenomena yang diamati secara logis (Dr.H. Zuchri Abdussamad, 2021). Melalui pendekatan ini, data yang dihasilkan berupa deskripsi dalam bentuk tulisan maupun lisan yang bersumber dari fenomena yang diamati pada objek penelitian, maupun dari perilaku yang teridentifikasi di lingkungan sekitar objek tersebut. Lebih lanjut, (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berpijak pada paradigma *interpretif*. Paradigma ini menekankan interpretasi mendalam terhadap gejala yang ditemukan di lapangan, dengan menelaah seluruh komponen penelitian serta keterkaitan antar komponennya secara holistik.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Akuntan Publik Dian Utami (KAPDU) sebagai lokasi magang sekaligus objek penelitian. Pengumpulan data mengacu pada dua jenis sumber sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2021), yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini melalui kegiatan wawancara dengan pihak penanggung jawab SPM 1 dan penyebaran kuesioner kepada seluruh staf auditor di KAP Dian Utami. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung, meliputi dokumentasi, kertas kerja pemeriksaan dalam software ATLAS, serta struktur organisasi KAP Dian Utami.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penerapan standar pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik XY. Melalui observasi, fakta-fakta lapangan dapat didapatkan secara nyata dan objektif. Menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian secara langsung, sehingga peneliti dapat memahami situasi sosial yang sesungguhnya dan memperoleh gambaran yang menyeluruh (Sugiyono, 2021).
2. Kuesioner, yakni penuli menyusun kuesioner dalam bentuk cetak yang terdiri dari dua

bagian. Bagian pertama berisi pernyataan dalam bentuk tabel persetujuan (setuju/tidak setuju) yang disusun berdasarkan Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 dan Kualitas Audit, sedangkan bagian kedua memuat pertanyaan dalam bentuk esai guna memberikan ruang bagi responden untuk mengungkapkan pendapat secara lebih mendalam.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber (Dr.H. Zuchri Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dua orang penanggung jawab SPM 1 di Kantor Akuntan Publik XY untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka selama pelaksanaan audit. Sebelum wawancara dilakukan, penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai panduan agar proses wawancara berjalan dengan terarah dan sistematis.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, seperti dokumen SPM, kertas kerja audit pada software ATLAS, company profile Kantor Akuntan Publik XY untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti dokumen tertulis, foto, rekaman suara, maupun video (Dr.H. Zuchri Abdussamad, 2021).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini tidak melibatkan data berupa angka, melainkan mencakup proses pengumpulan data sesuai dengan fenomena penelitian yang diamati, pengelompokan data, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh. Menurut (Rifa'i, 2023), analisis data kualitatif dapat meliputi identifikasi tema-tema utama, proses pengkodean data, pembentukan kategori, serta pencarian pola atau hubungan antar data. Hasil penelitian selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan fenomena yang penulis alami dan data yang telah terkumpul.

BAB IV PROFIL TEMPAT MAGANG

4.1. Profil Perusahaan

KAP Dian Utami resmi berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 326/KM.1/200 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Dian Utami dan berkedudukan di Yogyakarta. Kantor ini berlokasi di Km. 5, Jl. Godean No. 104, Area Sawah, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55292. KAP Dian Utami didirikan oleh Dian Utami, S.E., M.Ak., CLI, CPA, seorang akuntan publik bersertifikasi yang telah menekuni bidang audit selama lebih dari 15 tahun.



Gambar 4.1 Kantor Akuntan Publik Dian Utami

Nama Perusahaan	: Kantor Akuntan Publik Dian Utami
Alamat	: Km. 5, Jl. Godean No. 104, Area Sawah, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55292
Telepon	: 081390101022
Website	: www.kapdianutami.com

Kantor Akuntan Publik (KAP) Dian Utami menyediakan berbagai layanan profesional di bidang audit, akuntansi, konsultasi, dan perpajakan. Layanan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien secara komprehensif serta mendukung peningkatan kualitas tata Kelola dan pelaporan keuangan. Adapun jasa yang diberikan meliputi:

1. *Audit and Assurance Services*

a. *Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)* KAP Dian Utami menyediakan jasa audit atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan terbebas dari salah saji material. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accounting Advisory*

KAP Dian Utami juga menyediakan layanan berupa pemberian konsultasi dan pendampingan di bidang akuntansi, termasuk penerapan standar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. KAP Dian Utami membantu klien dalam memahami serta mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. *Independent Controls and Systems Process Assurance*

KAP Dian Utami menyediakan jasa evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan proses bisnis, termasuk pengendalian pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas sistem serta meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan.

d. *Financial Statement Review*

Selain audit, KAP Dian Utami juga memberikan revidi laporan keuangan dengan tingkat keyakinan terbatas. Melalui prosedur analitis dan permintaan keterangan kepada manajemen, auditor memberikan Kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan.

e. *Agreed Upon Procedure (AUP)*

KAP Dian Utami melaksanakan prosedur tertentu yang telah disepakati bersama klien sesuai dengan kebutuhan spesifik. Auditor akan menyusun

dan menerapkan prosedur sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, kemudian menyampaikan hasil temuan berdasarkan prosedur tersebut.

2. *Financial Advisory Services*

a. *Compilation of Financial Statements*

KAP Dian Utami membantu klien dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan data dan informasi yang diberikan manajemen tanpa memberikan opini atau assurance atas laporan tersebut.

b. *Accounting and Financial Consulting*

KAP Dian Utami menyediakan layanan yang mencakup konsultasi di bidang akuntansi dan keuangan untuk membantu klien meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan strategis.

c. *Management Consulting*

KAP Dian Utami memberikan jasa konsultasi manajemen untuk mendukung perencanaan strategis, pengembangan bisnis, serta peningkatan tata kelola perusahaan agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha.

d. *Bookkeeping*

KAP Dian Utami menyediakan jasa pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga klien memiliki laporan keuangan yang tertata dan terdokumentasi dengan baik.

3. *Tax Services*

a. *Corporate Income Tax*

KAP Dian Utami membantu perusahaan dalam pemenuhan kewajiban pajak badan, termasuk perhitungan, pelaporan, serta konsultasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. *Tax Planning*

KAP Dian Utami memberikan layanan perencanaan pajak untuk membantu klien mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien guna mengoptimalkan kondisi keuangan perusahaan.

c. *Personal Income Tax*

KAP Dian Utami juga menyediakan layanan terkait perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi, serta konsultasi perpajakan bagi individu.

4. *Other Services*

a. *Merger and Acquisitions*

KAP Dian Utami memberikan pendampingan dalam proses penggabungan maupun akuisisi perusahaan, termasuk analisis keuangan dan evaluasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis.

b. *Appraisal (Assets, Business, Hotel, and Company)*

KAP Dian Utami menyediakan jasa penilaian atas aset maupun entitas usaha untuk berbagai keperluan, seperti jasa transaksi bisnis, restrukturisasi, atau kebutuhan lainnya.

c. *Corporate Action*

Layanan yang disediakan KAP Dian Utami ini mencakup pendampingan dalam pelaksanaan aksi korporasi, termasuk perubahan struktur perusahaan atau kebijakan strategis lainnya.

d. *Set Up Company*

KAP Dian Utami membantu proses pendirian perusahaan, mulai dari aspek administratif hingga kepatuhan terhadap regulasi.

e. *Payroll*

KAP Dian Utami menyediakan layanan pengelolaan penggajian karyawan, termasuk perhitungan gaji, pajak, serta administrasi terkait.

4.2. Pelaksanaan Program Magang

Nama	: Devina Nasya Sekar Alea
NIM	: 22312146
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
Rencana Pelaksanaan	: 29 September 2025 – 3 Februari 2026

4.2.1. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Magang

Tabel 4.1. Aktivitas Magang

No.	Waktu	Aktivitas	Hasil	Penanggung Jawab
1.	29 September 2025 - 3 October 2025	a. Menerima pengarahan dari staf <i>Person in Charge (PIC)</i> magang terkait tata tertib, mekanisme penugasan, dan ekspektasi selama kegiatan berlangsung. b. Mempelajari penggunaan aplikasi <i>Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)</i> sebagai perangkat kertas kerja pemeriksaan audit berbasis daring, kemudian menyusun materi <i>PowerPoint</i> mengenai tata cara penggunaan ATLAS sebagai bahan referensi	a. Memahami aturan yang berlaku dan perlu ditaati selama kegiatan magang, sehingga pelaksanaan magang dapat berjalan secara efektif dan terarah. b. Mengenal dan memahami cara kerja <i>software</i> ATLAS sebagai perangkat kertas kerja pemeriksaan audit berbasis <i>online</i>, serta mampu menyampaikan materi penggunaannya kepada rekan magang. c. Memahami cara KAP mengidentifikasi calon klien potensial sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis kantor.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		bagi mahasiswa magang. c. Melakukan pengumpulan data perusahaan-perusahaan yang berpotensi sebagai calon klien melalui penelusuran berbagai sumber daring, serta menginput dan menyusun hasilnya ke dalam <i>spreadsheet</i> internal KAP.		
2.	06 - 10 October 2025	a. Mencari dan merekap data transaksi aktiva tetap tahun 2022 milik klien berdasarkan informasi keuangan yang telah diberikan oleh auditor, kemudian menyusunnya secara sistematis. b. Merekap rekening koran vendor klien A secara terstruktur	a. Memahami cara penelusuran dan pencatatan transaksi aktiva tetap dalam proses audit, termasuk bagaimana informasi keuangan klien dijadikan dasar pengerjaan. b. Memahami cara menyusun data transaksi vendor secara terstruktur sehingga memudahkan auditor dalam melakukan analisis dan penelusuran lebih lanjut.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		sebagai bahan analisis lebih lanjut oleh staf auditor. c. Membuat materi dan konten edukatif seputar audit dan akuntansi yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram KAP Dian Utami.	c. Mengembangkan kemampuan komunikasi publik dan penulisan konten yang relevan di bidang akuntansi, khususnya audit.	
3.	13 - 17 October 2025	a. Melakukan rekonsiliasi data aset dengan <i>General Ledger</i> (GL) klien B untuk memastikan kesesuaian antara catatan aset yang dimiliki klien dengan data yang tercatat dalam buku besar. b. Merekap <i>General Ledger</i> dari rekening koran klien dan mencocokkan setiap transaksi yang tercatat di	a. Memahami prosedur rekonsiliasi aset dan cara mengidentifikasi selisih antara catatan klien dengan buku besar yang perlu ditindaklanjuti oleh auditor. b. Memahami prosedur verifikasi transaksi untuk memastikan seluruh transaksi telah dicatat secara akurat, lengkap, dan konsisten antara rekening koran dengan <i>GL</i>. c. Memahami pentingnya pengarsipan bukti transaksi yang terstruktur sebagai salah	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		rekening koran dengan entri yang terdapat pada <i>GL</i>. c. Melakukan rekap bukti transaksi klien secara sistematis agar setiap transaksi yang dicatat memiliki bukti pendukung yang memadai dan dapat ditelusuri.	satu elemen penting dalam mendukung proses audit.	
4.	20 - 24 October 2025	a. Mempelajari konsep Smart Audit sebagai pendekatan audit berbasis teknologi, kemudian menyusun ringkasan (<i>summary</i>) atas materi tersebut sebagai bahan belajar. b. Melanjutkan pembuatan konten Instagram KAP Dian Utami seputar topik audit dan akuntansi.	a. Memperoleh wawasan mengenai pendekatan Smart Audit yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit dibandingkan metode konvensional. b. Mengembangkan kemampuan menulis dan menyajikan informasi akuntansi secara menarik dan mudah dipahami oleh publik. c. Memahami cara memantau dan memperbarui data calon	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		c. Melanjutkan pengumpulan dan rekap data calon klien ke dalam <i>spreadsheet</i> internal KAP.	klien secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pemasaran KAP.	
5.	27 - 31 October 2025	a. Melanjutkan penginputan kertas kerja klien ke dalam software ATLAS berdasarkan Laporan Auditor Independen (LAI) yang telah diberikan, mulai dari tahap analisis penerimaan klien hingga kertas kerja indeks A sampai D. b. Melanjutkan rekap <i>General Ledger</i> dan pencocokkan transaksi rekening koran ke GL klien.	a. Meningkatkan pemahaman atas alur dokumentasi audit di ATLAS secara menyeluruh, termasuk cara mengisi setiap indeks kertas kerja secara tepat dan berdasarkan dokumen LAI. b. Mengasah kemampuan analisis dan ketelitian dalam mencocokkan data transaksi antara rekening koran dengan <i>General Ledger</i> klien.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.
6.	03 - 07 November 2025	a. Menginput kertas kerja beberapa klien ke dalam software ATLAS berdasarkan LAI, mencakup seluruh	a. Memahami cara kerja software ATLAS dalam proses dokumentasi audit secara menyeluruh, termasuk cara pengisian setiap indeks	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		tahapan mulai dari analisis penerimaan klien hingga pengisian kertas kerja indeks A sampai D. b. Melakukan drafting laporan keuangan klien Y berdasarkan data yang telah diberikan auditor. c. Melakukan riset mengenai perusahaan-perusahaan yang dinilai berprospek untuk menjadi calon klien KAP Dian Utami.	berdasarkan dokumen LAI. b. Memahami struktur dan sistematika penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. c. Memahami cara KAP mengidentifikasi dan menilai prospek calon klien sebagai bagian dari strategi pemasaran secara sistematis.	
7.	10 - 14 November 2025	a. Merekap laporan keuangan klien X berdasarkan informasi keuangan yang diberikan klien ke dalam <i>spreadsheet</i> audit yang telah disediakan oleh auditor untuk ditindaklanjuti oleh staf.	a. Memahami cara menyusun data keuangan klien ke dalam <i>worksheet</i> audit secara teliti sebagai bahan yang akan ditindaklanjuti oleh staf auditor. b. Memahami perbedaan mendasar antara SAK EP dan SAK ETAP serta implikasinya terhadap	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		b. Melakukan riset mendalam mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pembaruan atas SAK ETAP yang sebelumnya berlaku. c. Melakukan riset terkait karakteristik laporan keuangan entitas nirlaba,	penyajian laporan keuangan klien. c. Memahami karakteristik pelaporan keuangan entitas nirlaba yang berbeda dari entitas berorientasi laba, khususnya dalam hal pengakuan dan penyajian.	
8.	17 – 21 November 2025	a. Menyusun materi presentasi (<i>PowerPoint</i>) mengenai pelaksanaan audit yang mencakup uji pengendalian (<i>test of control</i>), uji substantif (<i>test of detail</i> dan prosedur analitis substantif), serta pengumpulan bukti audit sesuai SA 501, 505, 510, 520, 530, 540, 560, 570, dan 580.	a. Memperoleh pemahaman mendalam mengenai tahapan pelaksanaan audit secara komprehensif sesuai dengan standar audit yang berlaku, mulai dari pengujian pengendalian hingga prosedur pengumpulan bukti. b. Melatih kemampuan komunikasi dan penyajian materi teknis secara sistematis dan mudah dipahami. c. Memahami cara pengisian <i>worksheet</i>	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		b. Mempresentasikan materi tersebut di hadapan partner, staf auditor, dan sesama teman magang KAP Dian Utami. c. Mengerjakan <i>worksheet</i> klien untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh staf auditor.	audit yang memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengerjakan laporan keuangan klien.	
9.	24 – 28 November 2025	a. Melanjutkan penginputan kertas kerja klien ke dalam ATLAS. b. Melanjutkan pengerjaan <i>worksheet</i> klien. c. Melanjutkan riset calon klien dan melakukan pembaruan data di <i>spreadsheet</i> internal KAP.	a. Meningkatkan pemahaman atas alur dokumentasi audit di ATLAS melalui pengerjaan langsung pada lebih dari satu klien secara bergantian. b. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam menginput data keuangan klien ke dalam <i>worksheet</i> audit. c. Memahami cara merekap data calon klien secara detail sebagian dari upaya pengembangan bisnis KAP.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

10.	01 – 05 Desember 2025	a. Mengajukan beberapa usulan judul penelitian berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang berlangsung di KAP Dian Utami. b. Membuat template dan menyusun trial balance untuk perusahaan berorientasi laba maupun nirlaba di dalam aplikasi Smart Audit. c. Mempelajari audit program yang tersedia di Smart Audit dan menyusun ringkasannya sebagai panduan pelaksanaan audit.	a. Memperoleh arahan awal mengenai fokus dan arah penelitian yang akan disusun berdasarkan fenomena yang diamati selama melaksanakan magang. b. Memahami struktur dasar kertas kerja audit digital serta perbedaan penyajian antara entitas laba dan nirlaba di dalam aplikasi Smart Audit. c. Memahami tahapan audit program di Smart Audit sehingga setiap proses audit dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan program yang sudah ada di sistem Smart Audit.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.
11.	08 – 12 Desember 2025	a. Mulai mengerjakan proses audit klien secara langsung di dalam web Smart Audit berdasarkan program audit yang	a. Memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan web Smart Audit, mulai dari tahap awal hingga pengisian kertas kerja.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		telah dipelajari sebelumnya. b. Mengerjakan <i>worksheet</i> Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai salah satu klien KAP Dian Utami. c. Membuat konten Instagram KAP Dian Utami seputar topik audit dan akuntansi	b. Memahami karakteristik laporan keuangan perbankan yang memiliki kompleksitas dan kekhususan yang berbeda dibandingkan entitas umum lainnya. c. Mengembangkan kemampuan komunikasi publik di bidang akuntansi melalui pembuatan konten media sosial yang relevan dan informatif.	
12.	15 – 19 Desember 2025	a. Mengoreksi surat konfirmasi bank milik klien untuk memastikan keakuratan informasi yang tercantum sebelum surat tersebut ditindaklanjuti oleh staf auditor. b. Merevisi surat konfirmasi tabungan dan deposito klien sesuai dengan data terkini yang	a. Memahami pentingnya memverifikasi keakuratan setiap informasi dalam surat konfirmasi sebagai bagian dari prosedur konfirmasi eksternal dalam audit. b. Memahami prosedur revisi surat konfirmasi agar sesuai dengan data klien yang terbaru dan dapat digunakan sebagai bukti audit yang valid. c. Memahami cara menyortir data deposito secara sistematis	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		diterima staf auditor dari klien. c. Menyortir data deposito klien secara terstruktur untuk memudahkan penelusuran lebih lanjut oleh staf auditor. d. Melakukan audit klien di ATLAS.	sehingga memudahkan auditor dalam melakukan penelusuran dan analisis. d. Meningkatkan kemampuan dalam mendokumentasikan kertas kerja audit secara lengkap di ATLAS.	
13.	22 – 26 Desember 2025	a. Menyusun materi presentasi (<i>PowerPoint</i>) SAK EP yang membahas ketentuan-ketentuan pokok sebagai pembaruan atas SAK ETAP. b. Menyusun materi presentasi mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) KAP yang berkaitan dengan standar pengelolaan kualitas dalam pelaksanaan jasa akuntan publik. c. Melanjutkan beberapa prose	a. Memahami pokok SAK EP serta apa perbedaannya dengan SAK ETAP, termasuk implikasinya terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan klien. b. Memahami standar pengelolaan kualitas yang diterapkan dalam pelaksanaan jasa akuntan publik sebagai bagian dari tata Kelola KAP yang profesional. c. Meningkatkan pemahaman atas alur audit secara menyeluruh melalui pengerjaan	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		audit klien di Smart Audit.	langsung pada beberapa klien di Smart Audit.	
14.	29 Desember 2025 – 02 Januari 2026	a. Melanjutkan proses audit beberapa klien di Smart Audit. b. Melanjutkan audit klien di ATLAS. c. Melanjutkan pembuatan konten Instagram KAP seputar topik audit dan akuntansi.	a. Meningkatkan pemahaman atas alur audit secara komprehensif melalui pengerjaan langsung pada beberapa klien di Smart Audit secara berurutan. b. Meningkatkan kemampuan dalam mendokumentasikan kertas kerja audit di ATLAS secara lengkap dan terstruktur. c. Mengembangkan kemampuan menulis konten yang relevan, informatif, dan mengikuti perkembangan di bidang audit dan akuntansi.	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.
15.	05 – 09 Januari 2026	a. Melakukan <i>footing</i> atas draft report klien untuk periode 2023-2025 guna memverifikasi kebenaran penjumlahan angka	a. Memahami prosedur footing sebagai salah satu tahap verifikasi keakuratan angka dalam laporan audit sebelum laporan tersebut	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		yang tersaji dalam laporan sebelum diterbitkan. b. Mengikuti sesi belajar bersama (<i>group learning</i>) bersama mahasiswa magang yang baru bergabung, dengan mengerjakan Smart Audit secara berkelompok mulai dari mapping akun, penyusunan <i>trial balance, cash flow</i>, hingga drafting report untuk dua klien. c. Mengerjakan audit empat klien menggunakan ATLAS.	difinalisasi dan diterbitkan. b. Memperoleh pemahaman menyeluruh atas alur audit dari tahap awal hingga pelaporan, sekaligus melatih kemampuan kerja sama tim dalam lingkungan profesional. c. Memperoleh pengalaman dalam menangani beberapa penugasan audit secara bersamaan menggunakan ATLAS.	
16.	12 – 16 Januari 2026	a. Melanjutkan pengerjaan audit klien di ATLAS secara menyeluruh berdasarkan dokumen dan informasi yang diteruskan oleh auditor dari klien.	a. Meningkatkan kemampuan dalam mendokumentasikan kertas kerja audit secara lengkap dan terstruktur di ATLAS. b. Memahami cara menyusun data rekening koran klien secara	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		b. Merekap rekening koran klien untuk menyusun data transaksi perbankan secara terstruktur sebagai bahan pendukung dalam proses audit. c. Melakukan <i>vouching</i> transaksi klien, yaitu penelusuran dari catatan akuntansi ke bukti-bukti pendukung yang mendasarinya.	sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan pendukung yang memadai dalam proses audit. c. Memahami prosedur substantif <i>vouching</i> dalam menelusuri keabsahan dan keberadaan setiap transaksi yang tercatat dalam pembukuan klien.	
17.	19 – 23 Januari 2026	a. Menyusun materi presentasi dan mempresentasikan topik bisnis proses KAP secara berkelompok di hadapan partner, staf auditor, dan rekan sesama mahasiswa magang. b. Melakukan pengecekan atas pendistribusian dana BAZNAS	a. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai alur operasional dan tata Kelola bisnis KAP, sekaligus melatih kemampuan presentasi dan kerja sama tim. b. Memahami cara memverifikasi kesesuaian penyaluran dana dengan ketentuan yang berlaku, termasuk secara menelusuri bukti	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		untuk memastikan kesesuaian antara penyaluran dana dengan ketentuan dan bukti pendukung yang tersedia. c. Melakukan reviu atas draft laporan audit BPR untuk mengidentifikasi kekeliruan yang perlu diperbaiki sebelum laporan difinalisasi oleh auditor.	pendukung distribusi dana. c. Memahami cara mengidentifikasi kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam draft laporan audit sebelum laporan tersebut didiskusikan bersama partner dan difinalisasi.	
18.	26 – 3 Februari 2026	a. Melanjutkan pengerjaan audit di ATLAS dan Smart Audit. b. Melakukan pengumpulan data penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh staf KAP Dian Utami dan wawancara mendalam dengan penanggung jawab Sistem	a. Meningkatkan pemahaman atas alur dokumentasi dan pelaksanaan audit secara menyeluruh melalui pengerjaan langsung pada klien di ATLAS dan Smart Audit. b. Memperoleh data penelitian melalui dua metode pengumpulan data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian yang sedang disusun,	Ika Nur Astuti, S.Akun., CTT, ACPA.

		Pengendalian Mutu (SPM) 1. Proses ini sempat terkendala karena dua bulan terakhir magang bertepatan dengan periode peak season audit, sehingga beban kerja seluruh staf cukup tinggi. Akibatnya, data penelitian baru dapat terkumpul secara lengkap pada awal Februari 2026.	meskipun proses pengumpulannya mengalami kendala akibat tingginya intensitas pekerjaan staf auditor selama peak season.	
--	--	---	---	--

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Dian Utami selama empat bulan, terhitung sejak 29 September 2025 sampai dengan 3 Februari 2026. KAP berlokasi di Jl. Godean Km. 5 No. 104, Yogyakarta. Gedung kantor terdiri atas dua lantai, di mana lantai pertama digunakan oleh auditor untuk bekerja, sedangkan lantai kedua diperuntukkan auditor serta mahasiswa magang.

Magang dilaksanakan selama lima hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dengan jam operasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Ketentuan berpakaian yang berlaku adalah atasan putih dan bawahan gelap pada hari Senin, batik pada hari Kamis, serta pakaian bebas dan sopan pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat.

Selama periode magang, penulis memperoleh berbagai penugasan yang berkaitan dengan proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur audit, hingga penyusunan laporan audit. Perkembangan kegiatan magang setiap bulan penulis uraikan sebagai berikut.

4.2.2. Bulan Pertama Magang

Pada bulan pertama pelaksanaan magang, penulis memperoleh pengarahan awal dari staf auditor sekaligus penanggung jawab magang mengenai peraturan, alur kerja, serta sistem penugasan selama magang. Setelah pengarahan tersebut, penulis mulai diberikan beberapa tugas awal yang bersifat pengenalan proses audit.

Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut.

Pertama, penulis mempelajari penggunaan aplikasi *Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)*, yaitu perangkat berbasis daring yang digunakan auditor untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengarsipkan kertas kerja audit secara efisien. Sebagai bentuk pemahaman atas materi yang telah dipelajari, penulis juga ditugaskan untuk menyusun materi presentasi (*PowerPoint*) mengenai tata cara penggunaan ATLAS, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa magang lainnya.

Kedua, penulis ditugaskan untuk mencari dan merekap data transaksi aktiva tetap tahun 2022 milik salah satu klien berdasarkan informasi keuangan yang telah diberikan auditor. Kegiatan ini bertujuan agar penulis memahami bagaimana pencatatan dan penelusuran transaksi aset tetap dilakukan dalam proses audit.

Ketiga, penulis melakukan rekap rekening koran vendor klien A. Penugasan ini bertujuan untuk menyusun data transaksi vendor secara terstruktur sehingga memudahkan auditor dalam melakukan analisis dan penelusuran lebih lanjut.

Keempat, penulis melakukan rekonsiliasi data aset dengan *General Ledger (GL)* klien B, guna memastikan kesesuaian antara catatan aset yang dimiliki klien dengan data yang tercatat dalam buku besar.

Kelima, penulis ditugaskan untuk membuat materi dan konten yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram milik KAP Dian Utami. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi komunikasi dan pemasaran kantor kepada publik, sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai bidang audit dan akuntansi secara lebih luas.

Keenam, penulis melakukan rekap *General Ledger* dari rekening koran klien, kemudian mencocokkan setiap transaksi yang tercatat di rekening koran dengan entri yang terdapat di *GL*. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara akurat dan lengkap.

Ketujuh, penulis melakukan rekap bukti transaksi klien secara sistematis. Pengarsipan bukti transaksi yang terstruktur ini merupakan bagian penting dalam proses audit, karena setiap transaksi yang dicatat harus didukung oleh bukti yang memadai dan dapat ditelusuri.

Kedelapan, penulis mempelajari konsep *Smart Audit* dan menyusun ringkasan (*summary*) atas materi tersebut. Pemahaman mengenai pendekatan smart audit memberikan wawasan kepada penulis tentang bagaimana proses audit dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan metodologi audit terkini.

Selain penugasan teknis di atas, penulis juga dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan data calon klien sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis KAP Dian Utami. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan penelusuran informasi mengenai klien melalui berbagai sumber daring. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diinput dan disusun ke dalam Spreadsheet internal kantor agar dapat digunakan sebagai acuan oleh staf auditor dalam menentukan prioritas calon klien. Kemudian, data yang dikumpulkan oleh penulis akan ditindaklanjuti oleh staf auditor dengan menyusun dan mengirimkan dokumen penawaran audit yang ditujukan kepada calon klien tersebut, sehingga penulis memperoleh pemahaman mengenai bagaimana KAP menjalankan strategi akuisisi klien secara sistematis dan profesional.

Kemudian, penulis mengikuti *sharing session* yang disampaikan langsung oleh staf auditor. Sesi ini bertujuan memperluas wawasan magang mengenai praktik audit di lapangan dari berbagai jenis entitas, termasuk Badan Layanan Umum, lembaga nirlaba, dan Bank Perekonomian Rakyat. Materi yang dibahas antara lain kertas kerja pemeriksaan dan strategi pemasaran bagi akuntan publik.

4.2.3. Bulan Kedua Magang

Memasuki bulan kedua, yaitu November 2025, penulis mulai melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan KAP untuk kemudian dijadikan sebagai objek dan tema penelitian. Dari hasil observasi tersebut, penulis menemukan ketertarikan terhadap tema prosedur audit. Adapun rincian kegiatan pada bulan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, penulis melakukan penginputan kertas kerja beberapa klien ke dalam *software Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)* berdasarkan Laporan Auditor Independen (LAI) yang telah diberikan oleh staf auditor, mulai dari tahap analisis penerimaan klien hingga pengisian kertas kerja indeks A sampai D.

Kedua, penulis ditugaskan untuk melakukan drafting laporan keuangan klien Y. Kegiatan ini bertujuan agar penulis memahami struktur dan sistematika penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sebelum laporan tersebut ditindaklanjuti oleh staf auditor.

Ketiga, penulis merekap laporan keuangan klien X berdasarkan informasi keuangan yang telah diberikan oleh klien dari staf auditor ke dalam *worksheet* yang telah disediakan oleh auditor untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh staf auditor yang bersangkutan.

Keempat, penulis melakukan riset mengenai perusahaan-perusahaan yang dinilai berprospek untuk menjadi calon klien KAP Dian Utami. Hasil riset tersebut kemudian disusun secara sistematis sebagai bahan pertimbangan bagi KAP dalam menjalankan strategi pengembangan bisnisnya.

Kelima, penulis melakukan riset mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat sebagai tindak lanjut atas perubahan penggunaan standar SAK ETAP ke SAK EP. Riset ini bertujuan untuk memahami perbedaan mendasar antara kedua standar tersebut serta implikasinya terhadap pelaporan keuangan klien.

Keenam, penulis melakukan riset terkait laporan keuangan entitas nirlaba, guna memperluas pemahaman mengenai karakteristik pelaporan keuangan yang berlaku pada jenis entitas tersebut, yang berbeda dengan berorientasi laba pada umumnya.

Ketujuh, penulis mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan audit kepada sesama mahasiswa magang dan staf auditor. Materi yang disampaikan mencakup beberapa pokok bahasan, antara lain uji pengendalian (*test of control*), uji substantif (*substantive test*) yang meliputi uji rinci (*test of detail*) dan prosedur analitis substantif (SA 520), serta pengumpulan bukti audit. Dalam sub-topik pengumpulan bukti audit, penulis secara khusus membahas pertimbangan spesifik atas unsur pilihan (SA 501), konfirmasi eksternal (SA 505), perikatan audit tahun pertama terkait saldo awal (SA 510), prosedur analitis (SA 520), sampling audit (SA 530), audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait (SA 540), peristiwa kemudian (SA 560), kelangsungan usaha (SA 570), serta representasi tertulis (SA 580). Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan pelaksanaan audit secara komprehensif sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Selain itu, penulis melakukan penelaahan (*cross check*) atas draft laporan keuangan yang telah disusun oleh staf auditor, guna memastikan keakuratan informasi baik dari segi penulisan maupun perhitungan yang akan termuat dalam Laporan Auditor Independen (LAI). Penulis juga melakukan reviu atas laporan klien X, serta mencocokkan transaksi pada buku besar dengan rekening koran klien guna membuktikan keberadaan dan keabsahan setiap transaksi.

Di samping itu, penulis mengerjakan tugas berupa pemindaian berkas Surat Perikatan Kerjasama Audit, Surat Pernyataan Direksi, Surat Representasi untuk keperluan pengarsipan berkas audit melalui Drive, serta melakukan rekapitulasi aset tetap milik salah satu klien berdasarkan data keuangan yang disajikan dalam sebuah Spreadsheet.

4.2.4. Bulan Ketiga Magang

Memasuki bulan ketiga, yaitu Desember 2025, penulis mulai mengajukan beberapa usulan judul penelitian yang didasarkan pada hasil observasi selama magang di KAP Dian Utami. Pada bulan ini pula, penugasan yang diberikan kepada penulis semakin beragam dan menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses audit secara praktis. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut.

Pertama, penulis ditugaskan untuk membuat template hingga menyusun trial balance untuk perusahaan berorientasi laba maupun nirlaba di dalam aplikasi *Smart Audit*. Kegiatan ini bertujuan agar penulis memahami struktur dasar kertas kerja audit digital dan perbedaan penyajian antara kedua jenis entitas tersebut dalam sistem *Smart Audit*.

Kedua, setelah memahami dasar penggunaan *Smart Audit*, penulis mulai mengerjakan proses audit klien secara langsung di dalam web tersebut. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ini, penulis juga mempelajari dan menyusun ringkasan mengenai audit program yang tersedia di *Smart Audit*, sehingga setiap tahapan audit dapat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pada periode yang sama, penulis juga melanjutkan beberapa proses audit klien yang masih berjalan di dalam *Smart Audit*, sebagai bentuk kesinambungan dari penugasan sebelumnya.

Ketiga, penulis ditugaskan untuk mengerjakan worksheet BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu klien KAP Dian Utami. Penugasan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis dalam memahami karakteristik laporan keuangan bernakan yang memiliki kompleksitas berbeda dibandingkan entitas umum lainnya.

Keempat, penulis melakukan audit klien di ATLAS, melanjutkan proses pengisian kertas kerja digital berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh dari klien.

Kelima, penulis mengoreksi surat konfirmasi bank milik klien untuk memastikan keakuratan informasi yang tercantum sebelum surat tersebut dikirimkan kepada pihak bank. Sejalan dengan hal itu, penulis juga merevisi surat konfirmasi bank milik klien untuk memastikan keakuratan informasi yang tercantum sebelum surat tersebut dikirimkan kepada pihak bank. Sejalan dengan hal itu, penulis juga merevisi surat konfirmasi Tabungan dan deposito klien, serta melakukan penyortiran data deposito klien agar tersusun secara terstruktur dan memudahkan auditor dalam proses penelusuran lebih lanjut.

Keenam, penulis menyusun materi presentasi (*PowerPoint*) mengenai SAK EP, yang membahas ketentuan-ketentuan pokok dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat sebagai pembaruan atas SAK ETAP yang sebelumnya

berlaku. Penulis juga menyusun materi presentasi mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM) KAP, yang berkaitan dengan standar pengelolaan kualitas dalam pelaksanaan jasa akuntan publik.

Ketujuh, penulis Kembali ditugaskan untuk membuat konten yang akan dipublikasikan melalui akun Instagram KAP Dian Utami, sebagai bagian dari kegiatan komunikasi dan edukasi publik mengenai bidang audit dan akuntansi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh kantor.

4.2.5. Bulan Keempat Magang

Pada bulan keempat pelaksanaan magang, yaitu Januari 2026, kegiatan yang dijalani penulis semakin berfokus pada penugasan audit yang bersifat langsung dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan kondisi *peak season* audit yang terjadi pada awal tahun, sehingga intensitas pekerjaan di KAP Dian Utami meningkat secara signifikan. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut.

Pertama, penulis melakukan footing atas draft report klien X untuk periode 2023 hingga 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran penjumlahan angka-angka yang tersaji dalam laporan, sehingga tidak terdapat kesalahan perhitungan sebelum laporan tersebut diterbitkan.

Kedua, penulis terlibat dalam kegiatan belajar bersama (*group learning*) bersama mahasiswa magang yang baru bergabung pada awal tahun 2026. Dalam sesi ini, penulis bersama rekan-rekan magang mempelajari dan mengerjakan *Smart Audit* secara bertahap, mulai dari latihan *mapping* akun dan penyusunan *cash flow*, hingga tahap drafting report untuk dua klien secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman penulis atas alur audit secara menyeluruh, tetapi juga melatih kemampuan kerja sama tim dalam lingkungan profesional.

Ketiga, penulis melakukan reviu atas draft laporan audit BPR yang telah disusun sebelumnya, untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekeliruan atau bagian yang perlu diperbaiki sebelum laporan tersebut difinalisasi oleh auditor.

Kelima, penulis mengerjakan proses audit empat klien menggunakan aplikasi *ATLAS*. Penugasan ini meliputi pengisian kertas kerja audit secara menyeluruh berdasarkan dokumen dan informasi yang telah diperoleh dari

masing-masing klien juga Laporan Auditor Independen oleh auditor, sehingga penulis memperoleh pengalaman dalam menangani beberapa penugasan audit secara bersamaan.

Keenam, penulis melakukan rekap rekening koran klien, yang bertujuan untuk menyusun data transaksi perbankan secara terstruktur sebagai salah satu bahan pendukung dalam proses audit.

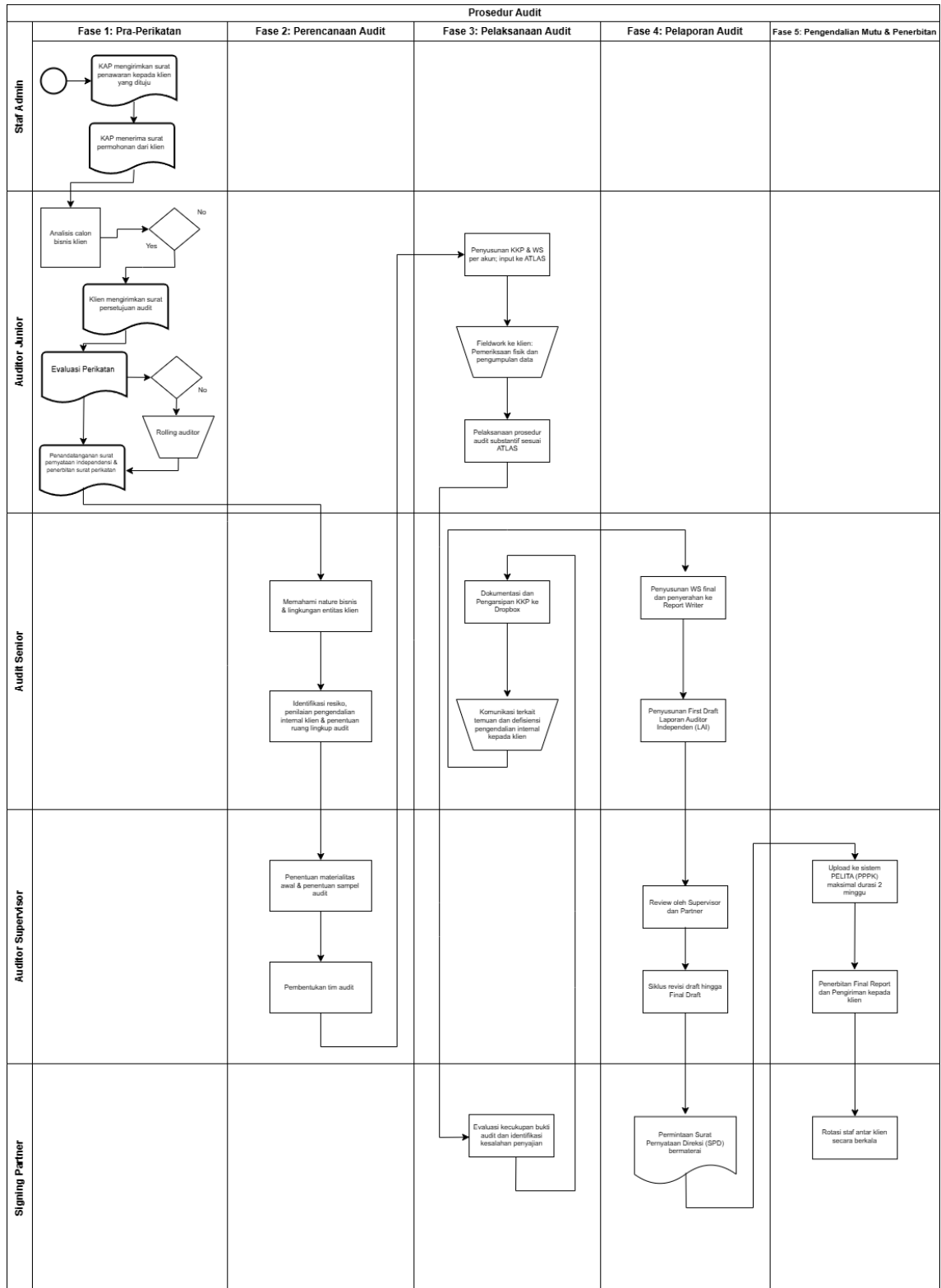
Ketujuh, penulis melakukan vouching terhadap transaksi klien, yaitu proses penelusuran dari catatan akuntansi ke bukti-bukti pendukung yang mendasarinya. Kegiatan ini merupakan salah satu prosedur substantif yang penting dalam audit untuk memastikan keabsahan dan keberadaan setiap transaksi tercatat.

Kedelapan, penulis bersama kelompok magang menyusun materi presentasi dan mempresentasikan topik mengenai bisnis proses KAP di hadapan partner, staf auditor, dan sesama mahasiswa magang. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alur operasional dan tata Kelola bisnis yang dijalankan oleh sebuah Kantor Akuntan Publik.

Selain penugasan teknis di atas, pada bulan keempat ini penulis juga melakukan pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu penyebaran kuesioner kepada seluruh staf KAP Dian Utami serta wawancara mendalam dengan salah satu penanggung jawab Sistem Pengendalian Mutu (SPM 1) di kantor tersebut. Namun demikian, proses pengumpulan data penelitian ini tidak berjalan tanpa hambatan. Mengingat dua bulan terakhir pelaksanaan magang bertepatan dengan periode peak season audit, seluruh staf auditor memiliki beban kerja yang cukup tinggi, sehingga penulis mengalami kendala dalam mengumpulkan data penelitian secara optimal. Akibatnya, data penelitian baru dapat terkumpul secara lengkap pada awal bulan Februari 2026, setelah intensitas pekerjaan di kantor mulai mereda. Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian yang sedang disusun oleh penulis.

4.3 Hasil Penelitian Magang

4.3.1 Prosedur Audit KAP XY



Pelaksanaan audit di Kantor Akuntan Publik XY dijalankan melalui alur prosedur yang sistematis dan terbagi ke dalam lima fase yang saling berurutan. Alur prosedur tersebut divisualisasikan dalam *flowchart* yang menggambarkan urutan setiap kegiatan beserta jabatan yang bertanggung jawab atas masing-masing prosedur, sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas. Setiap *lane* ada diagram mewakili satu jabatan, yaitu Signing Partner/Akuntan Publik, Audit Supervisor, Auditor Senior, Auditor Junior, dan Staf Admin. Alur prosedur bergerak dari kiri ke kanan mengikuti urutan fase, dengan panah yang menunjukkan arah perpindahan tanggung jawab antar jabatan.

- **Fase 1: Pra-Perikatan**

Proses audit diawali dari fase pra-perikatan yang melibatkan Staf Admin sebagai pelaksana awal administrasi perikatan. Staf Admin bertugas mengirimkan surat penawaran kepada klien yang dituju, kemudian menerima surat permohonan yang dikirimkan oleh klien sebagai respons atas penawaran tersebut. Setelah surat permohonan diterima, Auditor Junior melakukan analisis awal atas bisnis calon klien untuk memperoleh gambaran mengenai profil, struktur kepemilikan, dan potensi Risiko yang melekat pada entitas tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan evaluasi perikatan yang mencakup penilaian terhadap empat aspek utama yaitu integritas manajemen, kondisi khusus dan risiko, kompetensi auditor yang tersedia, serta penilaian independensi. Apabila dari evaluasi independensi ditemukan potensi benturan kepentingan antara auditor yang direncanakan dengan klien, maka dilakukan rolling atau pergantian penugasan auditor (No). Sebaliknya, apabila tidak ditemukan benturan kepentingan (Yes), klien diminta untuk mengirimkan surat persetujuan audit sebagai konfirmasi formal atas kesediaannya diaudit oleh KAP XY. Setelah surat persetujuan diterima, seluruh anggota tim yang ditugaskan menandatangani surat pernyataan independensi, dan Signing Partner menerbitkan surat perikatan sebagai dasar hukum nilainya penugasan audit.

- **Fase 2: Perencanaan Audit**

Fase perencanaan audit dilaksanakan terutama oleh Auditor Senior dan Audit Supervisor. Auditor Senior memulai tahapan ini dengan memahami nature bisnis dan lingkungan entitas klien secara mendalam, termasuk menelaah regulasi yang relevan dengan jenis usaha klien. Contohnya, ketentuan OJK untuk klien Bank Perekonomian Rakyat atau kebijakan akuntansi SAK EP untuk entitas privat. Selanjutnya, Auditor Senior Bersama Supervisor melakukan identifikasi risiko, penilaian pengendalian internal klien, dan penentuan ruang lingkup audit yang akan dijalankan.

Audit Supervisor kemudian menetapkan materialitas awal dan menentukan sampel audit menggunakan kertas kerja materialitas yang dimiliki KAP, dengan besar materialitas pelaksanaan umumnya ditetapkan sekitar 75 persen dari nilai akun. Signing Partner selanjutnya bertanggung jawab atas pembentukan tim audit dengan mempertimbangkan kompetensi, independensi, dan ketersediaan jadwal masing-masing auditor, sekaligus menetapkan time budget perikatan. Program audit per akun kemudian disusun oleh Audit Supervisor dengan mengacu pada prosedur yang tersedia dalam aplikasi ATLAS, sebagai panduan teknis yang akan digunakan tim selama pelaksanaan audit.

- **Fase 3: Pelaksanaan Audit**

Fase pelaksanaan audit merupakan fase dengan kegiatan tertinggi dan sebagian besar prosedurnya dilaksanakan oleh Auditor Junior dan Auditor Senior. Pelaksanaan dimulai dengan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan worksheet per akun yang seluruhnya diinput ke dalam aplikasi ATLAS (indeks A hingga D). Tim audit kemudian turun ke lapangan (fieldwork) untuk mengunjungi klien guna memperoleh data dan bukti audit secara langsung, termasuk melakukan pemeriksaan fisik yang minimal mencakup kas dan aset. Pada saat fieldwork, data yang terkumpul idealnya sudah mencapai minimal 70 persen dari kebutuhan audit.

Setelah fieldwork, Auditor Junior melaksanakan prosedur audit substantif sesuai program yang telah ditetapkan di ATLAS, mencakup sampling, vouching (pencocokan transaksi dengan rekening koran atau bukti pendukung), konfirmasi pihak ketiga, dan prosedur analitis. Audit Supervisor kemudian mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah terkumpul serta mengidentifikasi kesalahan penyajian yang ditemukan. Seluruh dokumen dan bukti audit selanjutnya diarsipkan secara digital ke Dropbox oleh Auditor Junior dan Auditor Senior. Fase ini ditutup dengan komunikasi kepada klien mengenai temuan audit dan defisiensi pengendalian internal yang teridentifikasi selama pelaksanaan.

- **Fase 4: Pelaporan**

Fase pelaporan diawali oleh Auditor Senior yang menyusun worksheet final dan menyerahkannya kepada report writer untuk dijadikan dasar penyusunan First Draft Laporan Auditor Independen (LAI), termasuk Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Draft tersebut kemudian di review oleh Auditor Supervisor dan Signing Partner untuk memastikan kebenaran kalkulasi, kelengkapan dokumentasi, dan kesesuaian dengan standar audit yang berlaku.

First draft selanjutnya dikirimkan kepada klien untuk direview. Apabila klien memberikan masukan atau terdapat hal yang perlu disesuaikan, dilakukan siklus revisi hingga draft kembali ke auditor untuk penyesuaian, kemudian dikirim ulang kepada klien. Proses ini berulang hingga seluruh isi laporan disetujui oleh kedua pihak dan mencapai status final draft. Pada tahap menjelang penerbitan, Signing Partner meminta Surat Pernyataan Direksi (SPD) bermaterai dari manajemen klien sebagai representasi tertulis yang menyatakan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang disajikan. Pengajuan SPD dilakukan pada tahap ini untuk memastikan tidak melewati batas waktu unggah ke sistem PELITA.

- **Fase 5: Pengendalian Mutu dan Penerbitan**

Fase terakhir mencakup serangkaian proses pengendalian mutu akhir sebelum laporan diterbitkan secara resmi. Audit Supervisor bertugas mengunggah laporan beserta dokumen pendukung seperti template, SPD

bermaterai, dan lembar tanggung jawab manajemen ke sistem PELITA milik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam batas waktu maksimal dua minggu sejak tanggal laporan. Signing Partner kemudian menerbitkan Final Report dan mengirimkannya kepada klien sebagai hasil akhir dari proses audit yang telah dilaksanakan.

Sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas audit dan independensi, KAP XY melakukan rotasi staf antar klien secara berkala. Rotasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas audit tetap terjaga dan setiap auditor memperoleh pengalaman yang beragam dari berbagai jenis perikatan. Dengan demikian, keseluruhan alur prosedur audit di KAP XY berjalan secara sistematis, terdokumentasi, dan melibatkan pembagian peran yang jelas di antara seluruh jabatan dalam tim audit, yang merupakan implementasi konkret dari elemen pelaksanaan perikatan dan sumber daya manusia dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1.

4.3.2 Hasil Olah Data

Penulis menyebarkan kuesioner kepada seluruh staf auditor KAP XY guna menilai penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) 1 dan kualitas audit secara aktual. Kuesioner terdiri dari dua bagian: bagian A mengenai enam elemen SPM 1 sebagaimana diatur dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI dan berlaku efektif per 1 Januari 2013, bagian B mengenai delapan indikator kualitas audit berdasarkan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018). Standar ini mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu secara proaktif berbasis risiko dan berorientasi kepatuhan. Total responden berjumlah sembilan orang staf auditor KAP XY.

a. Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1

Pada elemen Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu, seluruh responden menyatakan setuju terhadap semua pernyataan. Pimpinan KAP dinilai telah menunjukkan komitmen pada mutu dengan mengintegrasikan target kualitas audit ke dalam perencanaan strategis tahunan secara jelas. Terkait kebijakan remunerasi, salah satu responden memberikan catatan bahwa meski tinjauan mutu

menjadi pertimbangan utama, jumlah klien yang diperoleh terkadang tetap diperhitungkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan SPM 1 yang mewajibkan pimpinan KAP menciptakan budaya yang memprioritaskan mutu di atas pertimbangan komersial semata (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Responden juga sepakat bahwa pembagian wewenang atas mutu telah berjalan jelas, dan pimpinan KAP telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan audit demi meminimalisir human error.

Pada elemen Persyaratan Etika Profesi dan Independensi, seluruh responden menyatakan setuju. Mekanisme perlindungan *whistle blowing* dinilai telah tersedia dan menjaga integritas lingkungan kerja klien. Rotasi staf dianggap penting untuk meminimalisir risiko bias dan menjaga independensi serta skeptisisme profesional auditor. Penilaian kepatuhan terhadap kode etik telah terdokumentasi sebagai bagian dari penilaian kinerja tahunan, sejalan dengan ketentuan SPM 1 yang mewajibkan KAP memiliki kebijakan pemantauan terhadap ancaman independensi dan kepatuhan etika seluruh personilnya (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Pada elemen Penerimaan dan Keberlanjutan Klien, seluruh responden setuju bahwa prosedur due diligence dijalankan sebelum menerima klien baru untuk memastikan klien tidak terlibat dalam kecurangan laporan keuangan. KAP XY juga dinilai bersedia menolak perikatan apabila kompetensi staf yang tersedia tidak memadai untuk menangani kompleksitas industri klien, sebagai bentuk profesionalisme dan tanggung jawab moral. Evaluasi tertulis setiap tahun untuk keberlanjutan klien lama dianggap sebagai mekanisme kontrol kualitas yang memastikan KAP XY hanya bekerja sama dengan klien yang kooperatif dan berintegritas. SPM 1 menegaskan bahwa proses penerimaan dan keberlanjutan klien merupakan salah satu komponen dalam proses penilaian risiko KAP yang wajib dirancang secara sistematis.

Pada elemen Sumber Daya Manusia, responden setuju bahwa rekrutmen staf auditor memiliki standar kompetensi teknis dan integritas yang ketat agar kinerja meningkat. Target jam PPL yang wajib dipenuhi setiap tahun dinilai penting untuk mempertahankan kompetensi auditor secara konsisten sesuai perkembangan standar dan industri. SPM 1 mensyaratkan bahwa sumber daya

manusia KAP harus kompeten dan memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab sehubungan dengan peroperasian standar pengendalian mutu. Beban kerja tim dipantau agar auditor memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pendalaman bukti audit secara detail, dan jalur karir yang jelas berdasarkan kompetensi dinilai penting untuk memotivasi staf auditor bekerja lebih profesional.

Pada elemen Pelaksanaan Perikatan dan Supervisi, seluruh responden setuju bahwa KKA terstandarisasi wajib digunakan untuk menyamakan persepsi dan menjamin konsistensi di seluruh tim audit. *Review real-time* oleh auditor senior dianggap penting agar setiap ketidaksesuaian dapat segera ditangani dan mendukung perkembangan auditor junior. Pendokumentasian perbedaan pendapat teknis melalui konsultasi formal dengan partner dinilai sebagai mekanisme *crosscheck* untuk meminimalisir risiko dan memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif. Seluruh dokumen audit diarsipkan secara permanen agar bukti kerja tetap tersedia dan menjaga kerahasiaan data klien.

Pada elemen Pemantauan dan Remediasi, seluruh responden setuju bahwa KAP melakukan inspeksi mendalam minimal sekali untuk memastikan kepatuhan standar audit dan pengendalian mutu. Hasil temuan pemantauan dikomunikasikan kepada seluruh staf sebagai materi pembelajaran agar proses evaluasi tidak berhenti pada penemuan kesalahan semata. KAP juga dinilai memiliki prosedur formal untuk menindaklanjuti keluhan terkait kegagalan audit sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen terhadap kualitas. Tindakan remediasi seperti revisi SOP dilakukan segera setelah ditemukan celah dalam sistem, untuk memastikan prosedur audit selalu aman dan mutakhir.

b. Kualitas Audit

Pada indikator Kompetensi Auditor, seluruh responden setuju bahwa auditor memiliki pengetahuan teknis mengenai SPAP dan kerangka pelaporan keuangan yang relevan sebagai fondasi utama kompetensi, memenuhi jam minimum PPL sesuai ketentuan IAPI untuk menjaga kompetensi dan relevansi auditor dengan perkembangan industri, serta memiliki pengalaman yang memadai pada bidang industri klien untuk mengidentifikasi substansi risiko bisnis yang berdampak pada laporan keuangan secara lebih tepat sasaran.

Pada indikator Etika dan Independensi Auditor, seluruh responden setuju bahwa auditor memiliki pengetahuan teknis mengenai SPAP dan kerangka pelaporan keuangan yang relevan sebagai pondasi utama menjaga kompetensi, memenuhi jam minimum PPL sesuai ketentuan IAPI untuk menjaga kompetensi dan relevansi auditor dengan perkembangan industri, serta memiliki pengalaman yang memadai pada bidang industri klien untuk mengidentifikasi substansi risiko bisnis yang berdampak pada pelaporan keuangan secara lebih tepat sasaran.

Pada indikator Etika dan Independensi Auditor, seluruh responden setuju bahwa auditor secara konsisten mematuhi prinsip dasar etika profesi yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional, karena hal tersebut menjadi landasan bagi opini audit yang bukan hanya benar secara teknis melainkan juga mencerminkan kejujuran. Terdapat prosedur untuk memastikan tidak adanya kepentingan keuangan atau hubungan keluarga antara tim audit dan klien untuk menjaga objektivitas opini. Auditor juga dinilai memiliki keberanian mempertahankan opini yang benar meskipun menghadapi tekanan dari manajemen klien, guna menjaga keandalan laporan audit.

Pada indikator Penggunaan Waktu Personel Kunci, seluruh responden setuju bahwa partner terlibat secara memadai dalam tahap perencanaan audit untuk memastikan proses audit berjalan dengan efisien di bawah arahan strategis yang matang. Audit manajer mengalokasikan waktu yang cukup untuk mereview pekerjaan staf selama proses berlangsung guna menjamin kualitas dan keandalan hasil audit. Auditor juga memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi mengenai masalah yang kompleks dalam perikatan, sehingga setiap masalah yang sulit dapat diselesaikan melalui pertimbangan yang matang dan profesional.

Pada indikator Pengendalian Mutu Perikatan, seluruh responden setuju bahwa pelaksanaan audit didukung oleh metodologi audit dan perangkat lunak yang cukup memadai sehingga pelaksanaan audit lancar dan opini audit yang dihasilkan berbasis analisis yang baik. Prosedur konsultasi dilakukan secara formal apabila ditemukan perbedaan pendapat teknis agar setiap Keputusan

diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. *Engagement Quality Control Review (EQCR)* juga dilakukan secara objektif sebelum laporan audit diterbitkan, sejalan dengan ketentuan Standar Pengendalian Mutu KAP Dian Utami yang mewajibkan penelaahan mutu perikatan diselesaikan sebelum tanggal pelaporan agar seluruh isu signifikan dapat ditangani secara lebih efektif.

Pada indikator Hasil Reviu Mutu dan Inspeksi, seluruh responden setuju bahwa temuan dari inspeksi internal digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur audit ke depan sebagai bukti bahwa kekurangan yang ditemukan segera ditindaklanjuti. KAP juga menindaklanjuti rekomendasi dari reviu mutu eksternal PPPK atau IAPI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan memperkuat posisinya. Tingkat kesalahan dalam kertas kerja audit dinilai menurun setelah evaluasi periodik, karena evaluasi tidak hanya sekadar menjadi prosedur formalitas tetapi dapat meningkatkan akurasi dokumentasi secara nyata.

Pada indikator Rentang Kendali Perikatan, seluruh responden setuju bahwa jumlah staf dalam satu perikatan berada dalam jumlah yang ideal sehingga setiap anggota tim mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang memadai. Beban kerja dipantau pula agar tidak melampaui batas kemampuan kerja yang efektif untuk memastikan auditor memiliki waktu yang cukup melakukan audit secara teliti. Audit Supervisor mampu melakukan supervisi secara mendalam kepada setiap anggota tim karena jumlah staf yang dikelola masih dalam batas wajar, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan audit akibat kurangnya monitoring.

Pada indikator Organisasi dan Tata Kelola KAP, seluruh responden setuju bahwa struktur organisasi KAP mendukung terciptanya budaya kerja yang mengutamakan kualitas, dengan tanggung jawab mutu yang berjalan secara efektif melalui pembagian wewenang yang jelas. Sistem penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada target jumlah klien tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap standar audit, agar audit dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai etika profesi. KAP juga menyediakan sumber daya fisik dan teknologi yang cukup untuk mendukung kelancaran operasional audit dan

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Pada indikator Kebijakan Imbalan Jasa. Seluruh responden setuju bahwa penentuan fee audit mempertimbangkan risiko dan tingkat kerumitan bisnis klien agar kualitas audit yang menyeluruh dan berkualitas dapat terlaksana. Imbalan jasa yang diterima memastikan KAP dapat menugaskan staf dengan kompetensi yang sesuai, agar prosedur audit tidak diturunkan kualitasnya. Kebijakan fee juga diatur agar tidak menciptakan tekanan yang dapat merusak kualitas hasil audit, sehingga proses audit selalu berjalan berdasarkan standar profesionalitas yang tinggi.

4.3.3 Hasil Olah Data

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan penanggung jawab Standar Pengendalian Mutu 1 di KAP XY untuk memperoleh gambaran aktual mengenai mekanisme penerapan SPM 1, efektivitasnya terhadap audit, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Wawancara dilakukan menggunakan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan elemen SPM 1 dan delapan indikator kualitas audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018).

a. Mekanisme Penerapan Standar Pengendalian Mutu 1

Terkait tanggung jawab kepemimpinan, KAP XY menetapkan komitmen mutu melalui rapat kerja tahunan yang membahas target klien, estimasi omset, dan acuan standar mutu untuk satu tahun ke depan. KPI atas mutu diukur dari kualitas kertas kerja dan hasil laporan audit, serta dikaitkan dengan mekanisme kenaikan gaji dan jenjang karir staf. Narasumber menyampaikan bahwa pimpinan KAP memiliki visi agar seluruh staf pada akhirnya dapat mendirikan KAP sendiri, sehingga pembinaan kompetensi dan integritas diperlakukan sebagai investasi jangka Panjang, bukan sekadar pemenuhan persyaratan regulasi.

Mekanisme pemantauan independensi dilakukan melalui penandatanganan pernyataan independensi sebelum setiap penugasan, disertai pengecekan terhadap kemungkinan hubungan keluarga atau relasi bisnis antara personel dan klien. Apabila ditemukan potensi benturan kepentingan, auditor yang bersangkutan dialihkan ke perikatan lain. Untuk perikatan yang

melibatkan lebih dari satu jenis jasa, misalnya klien yang meminta layanan accounting service sekaligus audit memisahkan penanganannya ke entitas yang berbeda dengan tim yang berbeda pula guna menghindari ancaman independensi.

Untuk penerimaan klien baru, KAP menelusuri latar belakang klien melalui profil perusahaan dan potensi isu hukum. Untuk klien berulang, evaluasi dilakukan Kembali bersama partner dengan mempertimbangkan perubahan signifikan yang terjadi, seperti penerapan SAK EP yang mengubah perlakuan akuntansi BPR dan menuntut pembaruan penilaian risiko perikatan. Narasumber menegaskan bahwa meskipun klien sudah dikenal, proses pembelajaran tetap berlangsung karena setiap perubahan kondisi klien berpotensi membawa risiko baru yang harus diantisipasi.

Pemenuhan PPL dilakukan secara rolling berdasarkan sisa SKP masing-masing personel. Staf yang SKP-nya masih kurang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang relevan, baik yang dibiayai KAP maupun atas inisiatif pribadi. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dirinya terbiasa mencari pelatihan secara mandiri apabila menemukan tema materi yang dinilai relevan dengan kebutuhan perikatan ke depan, menunjukkan budaya belajar yang tidak semata-mata bergantung pada instruksi dari KAP.

Konsultasi teknis atas isu yang bersifat kompleks dilakukan melalui *Zoom Meetings* yang direkam dan disertai minute of meeting sebagai dokumentasi yang dapat digunakan saat inspeksi eksternal. Narasumber menjelaskan bahwa dokumentasi ini penting karena PPPK dalam proses inspeksi biasanya menelusuri isu-isu yang terjadi beserta bukti penanganannya, baik berupa foto, dokumen, maupun catatan tertulis. Seluruh data klien diamankan melalui penyimpanan digital di Dropbox setelah fieldwork selesai, menggantikan sistem *hardcopy* yang rentan terhadap kebocoran data.

Pengelolaan jadwal perikatan dilakukan sejak awal tahun melalui raker dengan mendahulukan perikatan dengan deadline ketat seperti klien BPR yang wajib submit paling lambat di bulan Maret, kemudian BLU yang harus submit

ke BPK pada bulan April, sebelum berlanjut ke klien NGO dan swasta. Pola penjadwalan ini mencegah penumpukan beban kerja yang berlebihan dan memberikan ruang supervisi yang memadai di setiap periode.

Fee audit ditentukan berdasarkan total aset klien dan tingkat kerumitan perikatan sebagai cerminan dari resiko dan sumber daya yang dibutuhkan. Apabila terjadi negosiasi, penurunan fee tidak jauh dari batas minimum yang memungkinkan seluruh prosedur audit tetap dijalankan secara penuh. Narasumber menegaskan bahwa kualitas prosedur audit tidak dapat dikompromikan hanya karena tekanan fee dari klien.

b. Efektivitas Penerapan SPM 1 dan Faktor Pendorong serta Penghambat

Secara umum, narasumber menilai bahwa penerapan SPM 1 di KAP XY telah berjalan secara efektif dalam cakupan yang sesuai dengan skala KAP perseorangan. Kepatuhan terhadap standar audit tetap mengacu penuh pada SPAP, dengan penyesuaian pada aspek-aspek organisasional yang memerlukan adaptasi berdasarkan ukuran KAP. Narasumber menyatakan bahwa perbedaan antara KAP XY dengan KAP berskala lebih besar terletak pada lingkup penerapan, bukan pada komitmen terhadap standar. Namun demikian, dari keseluruhan data yang diperoleh, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong maupun penghambat yang perlu dicermati.

c. Faktor Pendorong

1. Komitmen kepemimpinan yang aktif dan langsung.

Pimpinan KAP XY tidak hanya menetapkan standar mutu secara tertulis, tetapi juga terlibat langsung dalam pengawasan setiap perikatan dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Narasumber mengonfirmasi bahwa partner dilibatkan dalam seluruh proses, bukan hanya hadir saat penandatanganan laporan audit final. SPM 1 menegaskan bahwa pimpinan KAP bertanggung jawab menciptakan budaya yang memprioritaskan mutu dan menekankan pentingnya mutu dalam komunikasi, tindakan, dan keputusan yang diambil (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Komitmen ini tercermin dari visi pimpinan yang mendorong seluruh staf untuk kelak

mendirikan KAP sendiri, sehingga pembinaan dilakukan tidak sekadar untuk kepentingan operasional jangka pendek, melainkan sebagai investasi dalam pengembangan profesi.

2. Formalisasi sistem penelaahan mutu perikatan melalui SPM 1.

KAP XY telah menyusun dokumentasi yang merekam semua prosedur Engagement Quality Review (EQR), mulai dari perikatan yang telah ditelaah, persyaratan kompetensi, dan independensi penelaah, waktu pelaksanaan, hingga formulir dokumentasi dalam kertas kerja audit. Kertas Kerja Audit ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu di KAP XY cukup baik melalui supervisi partner juga terstruktur dalam sistem ATLAS yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Sehingga, kualitas opini yang diterbitkan bisa dikatakan baik.

3. Mekanisme remediasi berbasis analisis akar penyebab.

SPM 1 KAP XY mengatur secara eksplisit bahwa temuan berulang atau sistemik dari proses EQR dievaluasi melalui root cause analysis sebelum tindakan perbaikan ditetapkan (Kuncara & Santosa, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa KAP tidak sekadar bereaksi terhadap temuan, namun juga berupaya mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan secara struktural. Mekanisme ini mengharuskan KAP mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang proaktif, bukan hanya sebatas kepatuhan prosedural. Narasumber mengonfirmasi bahwa pembahasan internal pasca temuan selalu diarahkan pada identifikasi cara pencegahan agar kesalahan yang sama tidak terulang di periode berikutnya.

4. Sistem dokumentasi yang terstandarisasi dan berbasis digital.

Seluruh kertas kerja pemeriksaan, data klien, dan dokumentasi fieldwork disimpan secara sistematis melalui Dropbox, menggantikan sistem hardcopy yang rentan terhadap kehilangan dan kebocoran data. Penggunaan software ATLAS sebagai prosedur tertulis per akun memastikan setiap auditor memiliki panduan yang sama dalam menjalankan prosedur, sehingga konsistensi antar perikatan dapat terjaga. KAP juga memiliki prosedur dokumentasi yang memadai, termasuk pengamanan, kerahasiaan, dan dokumentasi proses audit saat perikatan.

Kesiapan dokumentasi ini juga menjadi modal nyata dalam menghadapi inspeksi eksternal dari PPPK yang memeriksa sistem dan kelengkapan dokumentasi KAP.

5. Budaya belajar berkelanjutan dan proaktif.

Seluruh staf memiliki kewajiban pemenuhan SKP melalui PPL setiap tahun dengan mekanisme rolling yang memastikan tidak ada personel yang tertinggal dalam pembaruan pengetahuannya. Narasumber mengungkapkan secara lebih signifikan bahwa budaya belajar mandiri di mana staf secara proaktif mencari pelatihan yang relevan tidak semata-mata menunggu penugasan dari KAP. Hal ini mencerminkan internalisasi nilai profesionalisme yang melampaui sekadar pemenuhan kewajiban minimum, dan mendukung pemenuhan ketentuan SPM 1 mengenai kompetensi SDM yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.

d. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan skala KAP yang berdampak pada struktur pengawasan mutu.

SPM 1 menetapkan bahwa KAP harus menugaskan individu yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dan waktu yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab. sistem pengendalian mutu.. Salah satu elemen yang diwajibkan adalah KAP menetapkan kebijakan bahwa pimpinan tertinggi (partner) bertanggung jawab penuh atas sistem pengendalian mutu, sehingga untuk perikatan yang memerlukan EQCR penelaah mutu tidak boleh menjadi bagian dari tim perikatan, dan tidak boleh terlibat dalam perikatan tersebut dalam bentuk apapun untuk menjamin independensi. Dalam kondisi KAP XY yang masih berskala kecil dan bersifat perseorangan, peran tersebut belum dapat dipenuhi secara ideal karena keterbatasan SDM. Akibatnya, fungsi pengawasan mutu masih merangkap pada partner yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab perikatan, yang berpotensi mengurangi obektivitas pengawasan sebagaimana disyaratkan SPM 1. Narasumber sendiri mengakui bahwa elemen ini lebih relevan untuk KAP berskala menengah ke atas yang memiliki banyak cabang.

2. Tantangan pemenuhan persyaratan independensi penelaah mutu.

KAP XY mewajibkan bahwa penelaah mutu perikatan tidak merupakan bagian dari tim perikatan yang ditelaah, memiliki kompetensi memadai, dan menjalani cooling-off period minimal dua tahun sebelum dapat menelaah klien yang sama (Kuncara & Santosa, 2025). Dengan jumlah personel yang terbatas, pemenuhan persyaratan ini secara konsisten pada seluruh perikatan yang diklasifikasikan memiliki risiko mutu signifikan menjadi tantangan praktis yang nyata, terutama pada periode *peak season* ketika seluruh staf terlibat penuh di berbagai perikatan secara bersamaan. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah dalam penerapan EQR yang seharusnya menjadi mekanisme pengendalian mutu tingkat perikatan yang paling krusial.

3. Keterbatasan kapasitas *software audit* yang meningkatkan risiko *human error*.

Narasumber mengakui bahwa ATLAS yang digunakan masih lebih sederhana dan terbatas dibandingkan *software audit* yang digunakan KAP berskala lebih besar. Dalam praktiknya, ATLAS lebih berfungsi sebagai checklist prosedur daripada sistem audit terintegrasi dari perencanaan hingga pelaporan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas deteksi anomali data secara sistematis, membuat proses audit lebih bergantung pada ketelitian manual auditor, dan meningkatkan risiko *human error*, khususnya pada periode *peak season* ketika volume pekerjaan tinggi dan tekanan waktu besar. SPM 1 mengharuskan KAP memastikan bahwa sumber daya teknologi yang digunakan memadai untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian mutu yang efektif.

4. Belum adanya sistem pencatatan formal atas aktivitas *knowledge sharing internal*.

KAP Dian Utami telah memiliki kebiasaan berbagi hasil materi PPL yang berjalan secara konsisten dengan setiap staf mencari materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan perikatan ke depan, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh tim melalui *Zoom Meetings* disertai

materi dalam bentuk PDF atau PPT. Namun demikian, aktivitas knowledge sharing tersebut belum didukung oleh sistem pencatatan yang terstruktur, seperti rekap yang mendokumentasikan siapa yang menyampaikan materi, pada tanggal berapa sharing knowledge dilaksanakan, dan topik apa yang dibahas. Tanpa rekap tersebut, KAP tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai distribusi dan cakupan pengetahuan yang telah disebarluaskan dalam satu periode, sehingga sulit untuk mengidentifikasi apakah terdapat topik atau kompetensi tertentu yang belum terjangkau oleh mekanisme sharing yang ada.

5. Ketergantungan pada kualitas data klien yang berada di luar kendali KAP.

Dalam melaksanakan perikatan, KAP XY juga menghadapi situasi di mana data yang diberikan klien mengandung kesalahan pencatatan, seperti angka yang salah dimasukkan ke akun yang tidak sesuai. Kondisi ini membuat auditor untuk tidak hanya mengidentifikasi kesalahan tersebut, tetapi juga memperbaiki dan menyusun ulang data dari awal sebelum prosedur audit substantif dilanjutkan. Proses perbaikan ini menyita waktu dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pelaksanaan prosedur audit, sehingga berpotensi membuat proses audit sedikit terhambat. Narasumber mengonfirmasi bahwa kasus seperti double keeping merupakan salah satu contoh nyata yang pernah terjadi dan memerlukan penyesuaian ulang oleh tim audit. Meskipun KAP telah mengantisipasi melalui proses penerimaan klien yang terstruktur dan evaluasi berkala, risiko ini tidak dapat sepenuhnya dieliminasi karena kualitas pencatatan internal klien sepenuhnya berada di luar kendali langsung KAP.

Evaluasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 terhadap kualitas audit di KAP XY. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada seluruh staf auditor serta wawancara mendalam dengan penanggung jawab SPM 1, dapat

disimpulkan bahwa KAP XY telah menerapkan keenam elemen SPM 1 secara cukup efektif dalam cakupan proporsional dengan skala operasional KAP perseorangan. Kedelapan indikator kualitas audit sebagaimana ditetapkan dalam (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018) juga menunjukkan penilaian yang positif dari seluruh responden. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang masih memerlukan penguatan agar penerapan SPM 1 dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

Dari sisi mekanisme dan praktek aktual penerapan SPM 1, KAP XY telah membangun sistem yang terstruktur mencakup seluruh tahapan perikatan mulai dari pra-perikatan hingga pasca-perikatan termasuk pelaporan. Komitmen mutu ditetapkan melalui rapat kerja tahunan yang membahas target dan acuan standar secara bersama, dengan KPI yang dikaitkan langsung pada kualitas kerja dan laporan audit. Setiap staf diwajibkan menandatangani pernyataan independensi sebelum penugasan, disertai pengecekan potensi benturan kepentingan. Prosedur penerimaan klien baru maupun evaluasi keberlanjutan klien lama dijalankan secara terstruktur dengan mempertimbangkan perubahan signifikan pada kondisi klien, seperti penerapan SAK EP yang mengubah perlakuan akuntansi BPR. Konsultasi teknis atas isu yang kompleks didokumentasikan melalui *Zoom Meetings* yang direkam beserta notulennya, dan seluruh data klien diamankan secara digital melalui Dropbox. Penjadwalan perikatan dilakukan sejak awal tahun untuk mengantisipasi tekanan peak season, dengan mendahulukan perikatan dengan deadline regulasi seperti BPR dan BLU sebelum klien lainnya.

Kualitas audit yang dihasilkan KAP XY didukung oleh praktek yang selaras dengan standar audit yang berlaku. Sebagaimana diobservasi dalam penelitian ini, KAP menjalankan tahapan audit yang sistematis mulai dari perencanaan yang menekankan pemahaman mendalam atas nature bisnis klien, pelaksanaan yang berbasis materialitas dan sampling, hingga pelaporan yang melalui mekanisme review berjenjang sebelum laporan final diterbitkan. Hal ini sejalan dengan temuan pada KAP XY dalam konteks penerapan standar audit, di mana pemahaman atas entitas klien menjadi landasan penentuan risiko, materialitas, dan prosedur audit yang tepat. Penggunaan ATLAS sebagai prosedur tertulis per akun memastikan konsistensi pendekatan audit antar perikatan,

meskipun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan *software* audit yang lebih mutakhir. Independensi auditor dijaga melalui pernyataan tertulis, rotasi penugasan, dan pemisahan tim untuk jenis jasa yang berbeda pada klien yang sama, yang merupakan implementasi nyata dari elemen etika dan independensi dalam SPM.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 terhadap kualitas audit di KAP XY, dengan data yang diperoleh melalui kuesioner kepada sembilan staf auditor dan wawancara mendalam dengan penanggung jawab SPM. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pertama, KAP XY telah menerapkan keenam elemen SPM 1 secara terstruktur dan dapat dibuktikan secara dokumentatif. Komitmen mutu dituangkan dalam KPI berbasis kualitas kerja yang dibahas pada rapat kerja tahunan. Independensi dijaga melalui pernyataan tertulis sebelum penugasan dan rotasi berkala. Penerimaan klien melalui *due diligence* dan evaluasi ulang saat kondisi klien berubah signifikan, seperti penerapan SAK EP pada klien BPR. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui PPL rolling berbasis SKP dan knowledge sharing via Zoom Meetings yang terdokumentasi. Pelaksanaan perikatan menggunakan ATLAS sebagai prosedur tertulis per akun, konsultasi teknis dicatat dalam notulen, dan seluruh data klien diarsipkan di Dropbox serta Flashdisk milik KAP. Pemantauan dilakukan minimal sekali per periode dengan tindak lanjut berbasis analisis akar penyebab.

Kedua, penerapan SPM 1 terbukti efektif dalam menjamin kepatuhan audit terhadap SA, meskipun efektivitasnya belum merata di seluruh elemen. Empat elemen berjalan efektif penuh, yaitu tanggung jawab kepemimpinan, etika dan independensi, penerimaan klien, serta pemantauan dan remediasi, reviu berjenjang sebelum penerbitan laporan, dan mekanisme root cause analysis yang mendorong perbaikan struktural. Dua elemen yang masih memerlukan penguatan adalah sumber daya manusia yang dikarenakan *knowledge sharing* belum memiliki rekap formal dan belum meratanya pemahaman materi yang diberikan serta pelaksanaan perikatan yang dikarenakan persyaratan independensi EQR sulit dipenuhi secara konsisten akibat keterbatasan personal pada periode peak season. Keterbatasan tersebut merupakan

hambatan struktural KAP perseorangan, bukan cerminan kurangnya komitmen.

Ketiga, upaya KAP XY dalam mempertahankan kualitas audit didukung oleh lima faktor pendorong yaitu komitmen pimpinan yang terlibat langsung dalam setiap perikatan, prosedur EQR yang terformalisasi sehingga laporan tidak dapat diterbitkan sebelum seluruh isu dapat diselesaikan, remediasi berbasis akar penyebab, dokumentasi digital terstandarisasi melalui ATLAS dan Dropbox, serta budaya knowledge sharing yang konsisten. Hal ini tercermin dari seluruh sembilan responden yang menyatakan setuju terhadap semua pernyataan pada delapan indikator kualitas audit IAPI. Di sisi lain, lima faktor penghambat perlu ditangani yaitu rangkap peran partner sebagai penanggung jawab perikatan sekaligus pengawas mutu, tantangan pemenuhan cooling-off period saat peak season, kapasitas ATLAS yang terbatas sebagai checklist, belum adanya rekap *formal knowledge sharing* dan ketergantungan pada kualitas data klien di luar kendali KAP. Secara keseluruhan, skala KAP bukan penghalang bagi penerapan standar mutu yang berkualitas, sepanjang komitmen kepemimpinan dan peningkatan mekanisme standar mutu internal KAP tetap optimal dan konsisten.

5.2. Implikasi

Implikasi Penerapan SPM 1 terhadap Kualitas Audit KAP XY

Penerapan SPM 1 di KAP XY memiliki implikasi langsung yang terukur terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Pertama, elemen kepemimpinan yang menempatkan mutu sebagai prioritas strategis yang dibuktikan dengan KPI berbasis kualitas kerja dan keterlibatan langsung pimpinan dalam setiap perikatan sehingga berdampak pada terbentuknya budaya kerja yang tidak mengorbankan prosedur demi tekanan komersial. Hal ini sejalan dengan temuan kuesioner bahwa seluruh responden setuju bahwa auditor memiliki keberanian mempertahankan opini yang benar meskipun menghadapi tekanan klien, yang merupakan indikator kualitas audit yang sangat mendasar.

Kedua, mekanisme EQR yang terdokumentasi dalam ATLAS dan dilaksanakan sebelum penerbitan laporan memberikan jaminan bahwa setiap laporan audit yang diterbitkan KAP XY telah melalui lapisan penelaahan yang tidak dapat dilewati. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap opini yang dihasilkan. Ketiga, mekanisme remediasi berbasis root cause analysis

berdampak pada penurunan tingkat kesalahan dalam kertas kerja audit secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh seluruh responden dalam hasil olah data kuesioner dan wawancara.

Namun demikian, dua area penghambat memiliki implikasi negatif yang perlu dikelola. Rangkap peran partner sebagai penanggung jawab perikatan sekaligus pengawas mutu berpotensi mengurangi objektivitas pengawasan, meskipun dalam praktiknya keterlibatan substantif partner telah memitigasi risiko secara parsial. Kapasitas ATLAS yang masih berfungsi sebagai checklist meningkatkan ketergantungan pada ketelitian individual auditor, yang pada periode *peak season* dapat meningkatkan resiko *human error* dan berpotensi memengaruhi konsistensi kualitas output audit.

Implikasi bagi Profesi dan Pengawas KAP

Penelitian ini menghasilkan implikasi yang relevan bagi IAPI selaku penyusun standar dan PPPK selaku pengawas profesi. Temuan bahwa beberapa persyaratan SPM 1, khususnya terkait independensi penelaah mutu dan pemisahan peran pengawas dari tim perikatan menghadapi hambatan struktural yang nyata pada KAP perseorangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain standar dan kapasitas implementasi aktual KAP kecil di Indonesia.

Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya IAPI mempertimbangkan panduan implementasi SPM 1 yang lebih operasional dan kontekstual bagi KAP perseorangan, termasuk kemungkinan mekanisme pemenuhan alternatif seperti penelaah mutu eksternal antar KAP yang tetap mempertahankan substansi independensi tanpa menysaratkan ketersediaan personel internal yang tidak dimiliki KAP kecil. Bagi kesesuaian formal dokumen, melainkan juga pada penilaian substansi pengendalian mutu yang sesungguhnya dicapai, disertai ruang dialog yang konstruktif bagi KAP kecil dalam melaporkan tantangan implementasi yang mereka hadapi.

Implikasi bagi Pengembangan Kompetensi Auditor

Temuan bahwa pemenuhan PPL secara formal tidak selalu berbanding lurus dengan internalisasi substansi materi yang dipelajari memiliki implikasi penting bagi sistem pengembangan kompetensi auditor secara nasional. Seorang auditor dapat memenuhi target SKP namun belum tentu menerapkan materi pelatihan dalam bentuk

praktik audit nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbasis pemenuhan jam kredit perlu dilengkapi dengan mekanisme verifikasi penerapan, contohnya melalui evaluasi berbasis perikatan atau *peer review* yang menilai kompetensi aktual. Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa kualitas audit tidak dapat dicapai semata-mata melalui kepatuhan prosedur, namun semuanya dapat terwujud apabila auditor menginternalisasi nilai profesionalisme, integritas, dan skeptisisme profesional sebagai identitas, bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 terhadap kualitas audit di KAP XY. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada sembilan staf auditor serta wawancara mendalam dengan penanggung jawab SPM 1. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menarik tiga simpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada KAP Dian Utami sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPM 1 ke depannya.

- KAP XY perlu mempertimbangkan untuk secara bertahap membangun struktur pengawasan mutu yang lebih independen, seiring dengan pertumbuhan skala operasional KAP. Dalam jangka pendek, hal ini dapat dimulai dengan mendokumentasikan secara eksplisit pembagian peran antara fungsi perikatan dan fungsi pengawasan mutu meskipun masih diemban oleh personel yang sama, sehingga objektivitas proses EQR tetap dapat dipertanggung jawabkan. Dalam jangka Panjang, penambahan personel yang dapat berperan sebagai penelaah mutu independen akan menjadi langkah strategis yang sejalan dengan persyaratan SPM 1.
- KAP XY perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas *software* audit yang digunakan, dari ATLAS menuju platform yang lebih terintegrasi seperti Smart Audit yang sudah digunakan oleh entitas afiliasi. Peningkatan ini akan mengurangi ketergantungan pada ketelitian manual auditor, mempercepat deteksi anomali data secara sistematis, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan konsistensi pelaksanaan prosedur audit di seluruh perikatan. Meskipun investasi

awal yang diperlukan tidak kecil, peningkatan ini sejalan dengan kewajiban KAP dalam SPM 1 untuk memastikan sumber daya teknologi yang digunakan memadai dalam mendukung sistem manajemen mutu yang efektif.

- KAP XY disarankan untuk membangun sistem pencatatan formal atas aktivitas knowledge sharing internal, misalnya dalam bentuk rekap sederhana yang mencatat nama penyampai materi, tanggal pelaksanaan, topik yang dibahas, dan tautan atau lampiran materi terkait. Rekap ini sederhana namun keberadaannya akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai distribusi pengetahuan dalam tim, sekaligus menjadi bukti formal atas kegiatan pengembangan kompetensi internal yang dapat ditunjukkan saat inspeksi eksternal.
- Untuk mengatasi kualitas data klien yang tidak selalu dapat dikontrol, KAP XY dapat mempertimbangkan untuk menyusun panduan atau checklist *pra-fieldwork* yang mengidentifikasi jenis kesalahan pencatatan yang paling sering ditemukan per jenis klien, sehingga auditor dapat mengantisipasi dan penanganannya lebih efisien sejak awal ketika turun ke lapangan. Pendekatan ini tidak menghilangkan risiko sepenuhnya, namun dapat mengurangi waktu yang terbuang untuk memperbaiki data dari awal dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran selama pelaksanaan perikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, B. M. H. A., Suryo, M., & Maulana, D. (2025). *Audit Quality Improvement : Auditing Standards and*. 9(2), 67–76.
- Allo, C. G., & Nugroho, Y. A. K. (2021). Hubungan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik dengan Etika Profesi dan Skeptisme Profesional Auditor. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 217–238. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p217-238>
- Alvin, A. A., Karsam, K., Syafrudin, S., & Gantino, R. (2023). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Timur dan Bekasi). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i1.458>
- Alvina Hanifa Rahmawati, & Nibras Anny Khabibah. (2024). *Analisis Penerapan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Purba Lauddin & Rekan Kantor Perwakilan Magelang)*. 6(1).
- Arnita, V., Diana, Y., & Andini Puspita Sari. (2023). Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Di KAP. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 4(2), 153–159. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v4i2.1289>
- Ekonomi, J. (2025). *Dinamika Audit Modern : Tinjauan Literatur tentang Kualitas Audit , Skeptisisme Auditor , Independensi , dan Konsekuensi Ekonomi dalam Era 2021 – 2025 bank “ reduces bank riskiness ” dengan menekan risiko kredit dan memperbaiki disiplin pasar. 2022.*
- Empiris, S., Perusahaan, P., Sub, M., & Food, S. (2025). *1961-Article Text-7274-1-10-20250126*. 8(1), 586–597.
- Hendang Tanusdjaja, N. A. D. (2021). Pengaruh Standar Auditing, Standar Pengendalian Mutu, Dan Kode Etik Terhadap Kualitas Jasa Audit. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 386. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11664>
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2013). Spm 1. In *Iapi* (pp. 1–30).
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2018). Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik. In *Institut Akuntan Publik Indonesia* (pp. 1–20).

- Juliyanti Sidik Tjan, Muslim, M., Andriani Alimin, Muh Yamin Noch, & Yaya Sonjaya. (2024). Independence, Professional Skepticism, And Audit Quality: The Moderating Role Of Audit Fees. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 40–60. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1698>
- Karen, Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada. *Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Kuncara, K. A. P., & Santosa, B. (2025). *Sistem manajemen mutu (smm) 2*.
- Prastika, A., & Widodo, S. (2020). Current Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457.
- Renaldi, R., & Mawardi, R. (2021). Kompetensi Auditor, Independensi, Skeptisme Profesional dan Kualitas Audit. *Akuntabilitas*, 14(2), 153–168. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.22028>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Samosir, M., Sitorus, E. T., Nainggolan, R. P., & Marpaung, O. (2022). PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 131–145. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.122>
- Soenjaya dan Sofian. (2024). Pengaruh Independensi, Skeptisisme, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA) 2024*, 1(2), 3032–6273. www.jurnal.iapi.or.id
- Suherman, N. F. D., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Defisiensi Sistem Pengendalian Mutu (Spm) Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Defisiensi Audit. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 357–368. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14180>
- Syahputra, R., Yusuf, F., & Yusuf, F. (2024). Pengaruh Fee Audit, Rotasi Audit dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 19–28. <https://doi.org/10.51510/jakp.v7i1.1631>
- Syahrir, N., Hidayat B Tahawa, T., & Erwin. (2025). Menguji Efektivitas Pengendalian Intern dalam Memperkuat Hubungan antara Pemahaman Basis AkruaI dan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BKAD Kabupaten Majene). *Jurnal Akun Nabelo : Jurnal*

Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 7(1), 1164–1175.
<https://doi.org/10.11594/untad.jan.7.1.24712>

Violetta Rifqi Agastya, & Vania Belva Abidah Ardelia. (2024). Analisis Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 262–278. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.193>

LAMPIRAN

Lampiran Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme formal KAP dalam mengintegrasikan target kualitas audit ke dalam Rencana Strategis Tahunan? Apakah terdapat KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) khusus bagi Partner yang mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar mutu?	Kalo di KAP Dian Utami sendiri jadi kita komitmen mutunya itu langsung di review sama partner ya kebetulan, terus nanti jadi kita setiap awal tahun itu pasti ada punya kaya rencana tahunan gitu karena dalam satu tahun ke depan itu dibahas ketika raker juga. Kemarin kan sebenarnya untuk KBS tapi dari sisi KAP Dian Utami juga udah ada pembahasan juga jadi satu tahun ke depan nanti misalnya target klien itu mau berapa sih gitu dan omsetnya kira kira berapa sih sampe akhir tahun nanti gitu. Nah terus kalo misalnya mutunya sendiri kan pasti patokannya sama SPAP ya terus nanti juga ada reviu internal lagi gitu jadi untuk KPI itu nanti kita lihat dari kualitas hasil kertas kerja kita gitu terus sama hasil report juga dan misal dalam satu tahun misalnya kemarin itu kita juga ada semacam untuk kenaikan gaji gitu terus mungkin kalo struktural itu juga tidak seperti di KAP besar ya yang ada penilaian performance itu nanti misal nilainya bagus atau tidak itu nanti menentukan naik jabatan ato engga gitu. Kalo disini kebetulan karena disamaratakan semua, Ibu Dian sendiri juga inginnya semua staf itu nantinya akan membuat KAP juga gitu. Jadi, kita memang seperti saya sekarang kalau saya sudah dapat CPA, tinggal ujian untuk APanya untuk tanda tangan. Jadi memang

		sekarang lagi proses untuk menuju kesana gitu.
--	--	--

2.	Secara teknis, bagaimana sistem pemantauan independensi dilakukan terhadap seluruh staf sebelum penugasan dimulai untuk menghindari potensi benturan kepentingan?	Jadi kalau misalnya kita sebelum penugasan dimulai itu nanti kita tanda tangan untuk pernyataan independensinya gitu jadi kita juga ngecek nih misalnya oh ini klien ini ada hubungan keluarga nggak nih sama salah satu dari personelnnya kita gitu. Misalnya nanti ada salah satu dari kita yang kebetulan oh ini saudaranya atau temannya. Nah, kemudian itu kita nanti terjunkan untuk staf yang lain gitu. Jadi biar tidak bentrok jadi kita juga tidak ada kepentingan apapun gitu.
3.	Bagaimana prosedur teknis dalam melakukan evaluasi terhadap integritas manajemen klien baru? Parameter apa yang paling menentukan bagi KAP untuk menolak sebuah perikatan? Dan apabila dalam proses keberlanjutan klien, bagaimana KAP mendokumentasikan penilaian risiko jika terdapat perubahan signifikan pada struktur tata kelola klien?	Jadi kalau kita misalnya untuk klien baru, ada klien baru masuk gitu kita pasti cari tahu dulu background dari kliennya itu seperti apa. Misalnya, mungkin bisa dari internet gitu, dari profile companynya, terus misalnya ada issue dari kasus hukum gitu terutama itu biasanya yang jadi seperti pertimbangan kita untuk wah ini nanti resikonya akan seperti apa dan nanti untuk di penyajian laporannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk yang klien berulang kan kita sudah hafal ya untuk resikonya itu gimana, nah untuk klien berulang kita tuh biasanya evaluasi lagi lihat dari standar gitu misalnya seperti untuk klien BPR yang sekarang ini kan banyak juga yang berulang gitu jadi memang sudah nanti dibahas lagi bersama Pak Kun dan Ibu Dian selaku partner gitu. Kita juga melihat ada perubahan apa sih yang signifikan di klien itu walau sebenarnya secara garis besar kita

		sudah tahu klien itu seperti apa gitu tapi kita lihat lagi, misalnya klien BPR itu kan sekarang harus diterapkan SAK EP terus ada perlakuan untuk perhitungan CKPN itu nah disitu resiko terbesarnya untuk BPR itu gitu. Jadi, nah itu yang harus kita pelajari lagi gitu dan untuk setiap klien itu intinya adalah kita pasti ada proses belajarnya walau klien lama gitu.
5.	Bagaimana mekanisme verifikasi pemenuhan jam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi staf? Apakah terdapat konsekuensi administratif bagi staf yang tidak memenuhi standar kompetensi tahunan?	Kalau sanksi administratif dari kita sih gak ada ya, jadi kalo di kita itu contohnya misal Ibu Dian dan Pak Kung itu karena APA dia kan juga harus memenuhi PPL itu 40 skp setiap tahunnya begitu juga dengan saya karena sudah CPA dalam setahun itu harus 40 skp gitu kan. Beda lagi dengan perlakuan untuk ACPA itu kan hanya 3 skp kalo tidak salah. Jadi, dari kita ada rolling jadi misalnya kalau ada PPL dari IAPI atau dari OJK yang kira-kira masih relevan sama kerjaan gitu ya atau oke nih temanya misal menambah wawasan kita gitu. Misalnya kita ikut, entah itu dari Ibu Dian atau budget sendiri gitu tetap ikut. Biasanya kita lihat misalnya ada tema yang masih relevan gitu sama kerjaan kedepannya nanti biasanya diikuti 2 atau 3 oranglah dari masing-masing KAPDU atau KBS. Misalnya, ditanyakan apakah SKP masih kurang atau tidak, misalnya sudah cukup dialihkan ke yang lain. Karena saya suka ikut sendiri jadi suka cari-cari materi yang temanya masih baru dan kedepannya ternyata kita perlu juga biasanya

		saya ikut sendiri.
6.	Bagaimana alur peninjauan berjenjang di KAP ini apabila tim audit menghadapi isu teknis yang bersifat kompleks? Bagaimana hasil konsultasi tersebut didokumentasikan ke dalam Kertas Kerja Audit?	Kalau kita itu biasanya ketika misalnya ada isu dari klien atau ada pembahasan yang misalnya kita harus bahas secara internal kan kita pasti zoom ya buat sewaktu-waktu kita bisa nonton lagi, bisa dengerin lagi gitu kan. Terus kalau misalnya di klien biasanya kita wajib bikin minute of meeting gitu kaya notulennya lah gitu, jadi ketika itu nanti ada meeting atau zoom meeting kita bikin notulen nya. Itu yang akan kita butuhkan misalnya mau disclosure untuk di report gitu kan atau ketika nanti misalkan kena inspeksi gitu. Itu biasanya P2PK itu biasanya juga cari issuenya apa sih yang issuenya kemarin dan ap akita ada dokumentasinya gitu mau berupa foto atau dokumentasi atau tulisan gitu.
7.	Bagaimana alur koordinasi antara bagian SPM dengan tim perikatan dalam menindaklanjuti temuan inspeksi agar kesalahan serupa tidak terjadi di periode selanjutnya?	Buat alur koordinasi sih kita biasanya bakal ada pembahasan internal lewat Zoom Meetings juga, terus bahas juga cara penanganannya gimana biar tidak terjadi lagi. Tapi karena itu rencana dan bisa terjadi bisa tidak, ya kita usahakan semaksimal mungkin.
8.	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengevaluasi ketajaman skeptisisme staf saat mereka menghadapi penjelasan manajemen klien yang tidak konsisten dengan bukti dokumen?	Untuk skeptisisme auditor biasanya kita nilai dari penjelasan kliennya. Kalau ada pihak terkait yang mengadukan dan ternyata ada penjelasan yang berbeda dari tim auditnya, maka dari situ kita lihat titik temunya dimana. Kalau butuh dokumentasi atau bukti tambahan nantinya bakal kita mintakan ke tim auditnya.
9.	Bagaimana prosedur penelaahan terhadap ancaman independensi	Kalau terkait pemberian jasa audit dan non audit misalnya pajak gitu pasti kita pisahkan.

	yang timbul akibat pemberian jasa non-audit (jasa selain asuransi) kepada klien yang sama?	Kalau ada klien yang minta accounting service sekaligus audit, itu tidak boleh dilakukan dalam satu KAP dengan lebih dari satu jenis jasa. Jadi, misalnya KAP XY yang handle accounting service-nya, nanti KAP AB yang auditnya, tapi dengan tim yang berbeda juga. Begitu juga kalau ada audit general sama audit investigasi, karena kan walau sama-sama audit tapi beda ya, jadi timnya dipisah.
10.	Bagaimana KAP memantau distribusi waktu Partner dan Audit Manager pada tahap perencanaan yang berisiko tinggi? Apakah terdapat evaluasi terhadap rasio jam kerja dibandingkan jam kerja staf auditor lain?	Kalo kita sih semua kita libation ya dari proses perencanaan terus ketika di lapangan terus proses pelaporannya itu semuanya kita libatkan semuanya. Jadi, misalnya mungkin kalo partner ketika mau pelaporan aja atau reviu untuk laporannya. Tapi kalo misal dari manager sampai staf itu semuanya dilibatkan. Sebenarnya kalau dikit yaitu, lembur itu sebisa mungkin diminimalisir jadi kalo pak kun sama ibu dian itu gabisa gitu misal lembur. Kita kerja efektif dari jam 9 sampai dengan jam 5, tapi kalo memang ada deadline dari klien yang mungkin 2 hari lagi banget harus rilis gitu ya butuh cepat tektokan sama pak kun biasanya mau ga mau lembur. Tapi bukan jadi beban kita sebagai auditor, soalnya auditor itu kan harus lembur ya udah identic, kebetulan kalau disini waktunya lebih renggang daripada waktu aku di Jakarta itu wah itu sampe ga bisa hafal ini hari apa. Budaya kerjanya beda banget, kalo disini masih life balance lah.
11.	Sejauh mana efektivitas penggunaan perangkat lunak audit (<i>audit software</i>) dalam mendeteksi	Nah, kalo kita kan kebetulan untuk software audit itu kan masih pake ATLAS ya kalo di KBS udah lebih majulah udah pake Smart Audit

	anomali data seperti perhitungan materialitas atau prosedur wajib yang belum terpenuhi selama proses lapangan?	jadi kita sih litany ya masih manual sih. Jadi, memang ketelitian mata ya, jadi masih kita memang berdasarkan sampel sampel yang kita ambil aja jadi misal kaya kita smapling kan untuk akun akun tertentu. Nah, misal ini nanti ga sesuai dengan yang di GL nya klien gitu itu nanti baru kita tanyakan. Sejauh ini kalo aku sendiri misalnya ada anomali itu sejauh ini belum pernah sih masih aman aja. Kecuali kemarin pak hasnan itu kan ada yang double keeping aja utangnya. Sebenarnya Cuma kesalahan pencatatan aja, harusnya mungkin ga di akun itu nah itu masuknya ke akun yang lain gitu. Sebenarnya kalo atlas itu gimana ya, kalo untuk kita audit running pake atlas itu masih kurang sih karena atleast kalo simple ya simple banget kalo pas aku di Jakarta itu kita udah mulai dari tahap perencanaan klien itu udah isi software itu udah banyak banget gitu udah lengkap dan itu direviu berjenjang gitu. Kalo disini kan mungkin ya udah gitu ketika sudah 100% dibuat ya sudah gitu. Hasilnya ya berdasarkan itu aja gitu.
12.	Langkah korektif teknis apa yang dilakukan KAP sebagai respon terhadap rekomendasi hasil reviu mutu dari pihak eksternal (seperti P2PK atau IAPI)?	Ya kalo kita sih misalnya ada reviu nah ini kemarin kebetulan kan kita baru submit smm itu di tanggal 30 januari kemarin, itu kemarin baru sepakat dari KAP KAP yang ada di jogja, di Jakarta itu udah kita submitnya di tanggal 30 aja gitu. Karena mau ada reviu, biasanya inspeksi sih sampel, ga semua. Kalo kemaren, yang pernah kena itu KBS, tapi sebelum jadi KBS pas masih jadi KKSP. Kan pak kun sebelum

		bikin sendiri kan sempat sama pak kumala kan, nah itu pernah kena. Tapi itu juga kena SPM nya sih karena SPM nya dan di kliennya itu disampel lagi sama P2PK yaudah ya akhirnya ya misalnya ga ada ya kita buat gitu.
13.	Bagaimana KAP menentukan batas maksimal jumlah perikatan yang dapat ditangani oleh seorang Audit Manager atau Partner selama <i>peak season</i> untuk menjaga kedalaman reviu?	Jadi kita ya semua orang kan pengen punya klien yang banyak ya, tapi juga nggak bisa maksa juga harus melihat KAP ini sanggup nggak misal dari SDM nya, auditor nya gitu. Auditor itu kan juga harus jadi biasanya ini, kemarin di ketika kita raker itu juga kita kan sudah beberapa klien itu udah masuk nah itu biasanya kita sayang di awal tahun gitu. Jadi misalnya, aku disuruh ngeblok teman teman ini kliennya mana aja dan kapan tapi kalo sebisa mungkin ini ga bentrok gitu juga temen temen ga kewalahan gitu yang reviu balik lagi, itu juga ga kewalahan gitu. Jadi, memang kita atur jadwal sih untuk penentuan kliennya jadi mungkin kita terima dulu kliennya masuk tetapi kita lihat urgensinya gitu, kaya misalnya BPR. BPR itu kan paling lambat Maret untuk submit ke OJK jadi kita dahulukan gitu nah setelah itu nanti BPR sudah selesai semua baru kita masuk ke BLU. Nah, BLU itu kita harus submit ke BPK itu di bulan April biasanya jadi kita ada bulan ini keluarin BPR dulu baru abis itu BLU. Di bulan selanjutnya mungkin itu bisa lebih santai kan, itu udah mulai masuk lagi tu NGO sama swasta-swasta tuh kaya gitu. Jadi untuk yang reviu juga ga terlalu banyak, masih bisa ada ruang.

14.	Bagaimana struktur pelaporan normal dalam sistem <i>whistle blowing</i> internal KAP? Bagaimana KAP menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor?	Jadi kalau kita sebisa mungkin sebenarnya misal pak kun tu suka share tuh di grup staf tapi ya memang itu harus dipatuhi kalo ini hanya untuk belajar gitu tidak untuk disebarluaskan. Jadi ya kalo kita menggunakannya ya mungkin kalau dari individunya kan dari laptop ya, nah kita biasanya setelah selesai fieldwork itu kita masukkan semua data data yang kita dapat itu ke ini ke dropbox. Jadi kaya semacam kumpulan data data klien tu ada disana semua karena kan sekarang jamannya udah digital ya, kalo jaman dulu mungkin masih hardcopy kan jadi misalnya hilang ato apa gitu bisa bocor gitu kan data keuangan klien. Kalo sekarang kan ketika dapet data bisa di scan dan selanjutnya kita bisa ngamanin juga.
15.	Bagaimana prosedur teknis penyusunan anggaran biaya audit agar tetap mencakup seluruh prosedur substantif yang diperlukan, meskipun terjadi negosiasi fee dengan klien?	Terkait fee biasanya kita tentukan berdasarkan ini tingkat kesulitannya jadi misalnya tingkat kesulitannya klien itu biasanya sama total asetnya kita lihat dulu asetnya klien itu berapa jadi data kita kalo klien ini mampu loh bayar kita dengan menggunakan itu gitu. Terus misalnya nanti kan setelah ada keberatan ya kok mahal banget ya itu kan balik lagi ini resikonya besar gitu. Dan mungkin waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan sebuah klien itu tidak sebentar gitu karena tingkat kerumitannya lebih tinggi. Jadi itu sih yang jadi pertimbangan gitu. Terus balik lagi misal nego, misal budgetnya klien Cuma ada segini berarti kan kita harus ga jauh jauh tuh walaupun nurunin misal ga jauh jauh biasanya sih gitu.

16.	Ketika terlibat di sebuah perikatan, apakah pernah terjadi miskomunikasi di antara tim audit? Bagaimana langkah penyelesaiannya?	Kalo di perikatan sih sebenarnya kita sebisa mungkin komunikasinya 2 arah gitu, jadi misal dalam satu perikatan ada 2 atau 3 orang gitu nanti ya sebisa mungkin dalam satu perikatan itu semua issuenya kita harus tau gitu. Jadi, ketika nanti direview sama pak kun selaku partner atau kalau ada yang harus didiskus gitu. Kalau sekiranya sudah mentok & personel tidak menemukan solusi maka kita akan ada pembahasan ke partner gitu terkait apa yang harus dilakukan gitu.
17.	Bagaimana gambaran umum proses audit, alur kegiatan audit di klien yang ditangani KAP XY?	Kalau biasanya sebelum kita fieldwork kita udah minta data-data duluan gitu, jadi sebelum fieldwork kita bisa bikin kertas kerja, konfirmasi gitu. Jadi, kita bikin perencanaannya dulu di kantor gitu, kaya materialitas nya, terus prosedur auditnya seperti apa itu kita sudah kita rencanakan waktu di kantor. Ketika waktu sampai di klien nih kita udah tau nih hari pertama itu biasanya kalau saya itu di general biasanya pasti entry meeting dulu sama klien, kita bahas secara garis besar apa sih yang sudah kita lihat nih perubahan dari misalnya tahun lalu di tahun ini secara garis besar ini yang signifikan apa dan kenapa kok bisa signifikan banget naiknya kaha tau turunnya gitu. Nah, setelah itu biasanya kita kalo di hari pertama biasanya kita cash opname, jadi kalo sore di BPR itu teller itu tutup di jam 3 sore nah jam 3 sore itu kita cash opname terus di hari kedua kita bisa cek persediaan atau aset tetap gitu kan terus baru setelah itu kita minta dokumen-dokumen yang memang kita

		butuhkan.
18.	Apakah mekanisme dan praktek aktual terkait SPM 1 di KAP XY sudah sesuai dengan standar mutu dari IAPI?	Kalo mungkin standarnya dari IAPI itu memang sebenarnya ditujukkannya untuk KAP kelas skalanya menengah ya, jadi kalo untuk KAPDU ini masih skala kecil karena ada satu lagi sebenarnya satu elemen lagi di SPM itu jadi itu harus ada diwajibkan memiliki pimpinan kualitas mutu disitu. Jadi itu diluar dari tim perikatan tapi dia supervisi langsung dari partner gitu nah itu diwajibkan nah kalo di KAPDU masih skupnya terlalu kecil yak arena perseorangan juga kan jadi kalo menurutku mungkin kurang relevan untuk disamakan dengan SPM yang tinggi banget. Mungkin kalo untuk di KBS yang sekarang cabangnya sudah 13 cabang seluruh Indonesia itu masih relevan karena pimpinan kualitas mutu itu tugasnya adalah dia harus mobile. Jadi, dia keliling cabang cabang memastikan apakah cabang ini sudah mematuhi SPM atau belum gitu dari segi SDM nya terus dari perikatannya itu bagaimana itu sebenarnya kalo menurutku ya itu relevannya untuk di KBS sih.
19.	Karena KAP XY masih berbentuk perseorangan dan jangkauannya masih kecil, apakah ada perbedaan signifikan terkait penerapan SPM 1?	Kalo menurutku sih signifikan ya karena kan itu kan mengacu untuk yang scopenya juga besar gitu kalo di KAPDU mungkin ga banyak karena y akita masih kecil banget dan walaupun misalnya diwajibkan untuk adanya pimpinan kualitas mutu ya balik lagi berarti ada yang merangkap untuk mereview SMM nya kebetulan belum ada SDM nya.

20.	Sejauh mana penerapan SPM 1 di KAP XY? Misalnya dari tingkat kepatuhan terhadap standar auditnya di sebuah perikatan?	Kalo mungkin kepatuhan sama SMM nya sih sebenarnya sebelum ada SMM juga sudah menyesuaikan ya, jadi kalau misalnya contoh untuk di SDM nya juga sudah diberlakukan juga sebelum SMM ini mewajibkan untuk KAP itu memperhatikan PLL itu sudah dilakukan terus kalo dari perikatan juga sudah kita perhatikan juga. Dari independensi nya setiap staf, setiap personel itu seperti apa dan sebenarnya untuk secara garis besar udah sih tapi dengan scope yang lebih rendah ya jadi kalo KBS kan udah besar ya, kalo di KAPDU ya dengan scope yang kecil ini. Karena kalo misalnya sama antara perseorangan sama partnership ya beda. Tapi kalo kepatuhan audit dan standar auditnya tetap sama tetap mengacu dari IAPI gitu, kita menyesuaikan dengan SPAP juga jadi apapun yang diatur disitu ya kita patuhi.
21.	Apa saja faktor pendorong dan penghambat penanggung jawab SPM 1 di KAP XY dalam mempertahankan hasil kualitas audit dari acuan regulasi yang ada?	Faktor pendorongnya mungkin kita standarnya sesuai saja dengan yang berlaku, itu juga mungkin nanti misal kita kena inspeksi nih kita ya kita sudah ready semua gitu, sudah lengkap semua gitu. Terus kalo dalam mempertahankan kualitas auditnya sih ya sejauh ini sih kita berusaha untuk selalu mengusahakan kualitasnya baik dari segi kertas kerja kita lengkap dan rapi, dari segi independensi, dan misalnya mungkin opininya itu semua kita sesuaikan semua. Bedanya hanya dari scope aja.

KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR KUESIONER

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenalkan, saya Devina Nasya Sekar Alea, Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Saya sedang melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Dian Utami”.

Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Data yang akan diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan dalam kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,



Peneliti

Tata Cara Pengerjaan Kuesioner:

1. Kuesioner ini disusun untuk penyusunan Tugas Akhir Magang dan berkaitan dengan penerapan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) di KAP. Seluruh jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
2. Responden diminta untuk membaca setiap pernyataan dengan saksama, kemudian memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang dirasakan selama bekerja di KAP Dian Utami.
3. Untuk setiap pernyataan yang tersedia, responden diminta memilih salah satu jawaban dengan menggunakan tanda centang (✓):
 - Setuju, apabila pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang berlaku.
 - Tidak Setuju, apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku.
4. Setelah memilih jawaban Setuju atau Tidak Setuju, responden diminta untuk memberikan alasan singkat yang menjelaskan dasar pemilihan jawaban tersebut. Alasan dapat berupa pengalaman, praktik yang diterapkan, atau kebijakan yang berlaku di KAP.
5. Tidak terdapat jawaban benar atau salah dalam kuesioner ini. Responden diharapkan mengisi jawaban secara jujur

Identitas Responden:

1. Nama responden:

.....

2. Posisi di KAP:

☐ Audit Manager

☐ Audit Supervisor

☐ Senior Auditor

☐ Junior Auditor

3. Lama Bekerja di KAP:

☐ < 1 tahun

☐ 1-3 Tahun

☐ 3-5 Tahun

☐ 5 Tahun

4. Divisi/Bidang Penugasan Utama:

☐ Audit

☐ Assurance

5. Keterlibatan dalam Proses SPM

☐ Terlibat langsung

☐ Mengetahui tetapi tidak terlibat langsung

6. Pernah Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan terkait SPM:

☐ Pernah

☐ Belum Pernah

A. Standar Pengendalian Mutu (SPM 1)

Bagian A: Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Pimpinan KAP menunjukkan komitmen pada mutu dengan			

		mengintegrasikan target kualitas audit ke dalam perencanaan strategis tahunan kantor secara jelas.			
	2.	Kebijakan remunerasi/bonus bagi partner dan manajer didasarkan pada hasil tinjauan mutu, bukan pada jumlah klien yang didapat.			
	3.	Terdapat pembagian wewenang yang jelas sehingga staf yang bertanggung jawab atas mutu memiliki otoritas yang cukup untuk menegur staf yang lalai.			
	4.	Pimpinan KAP mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan teknologi audit (<i>software</i>) demi meminimalisir <i>human error</i> .			

Bagian B: Persyaratan Etika Profesi & Independensi

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Terdapat mekanisme perlindungan (<i>whistle blowing</i>) bagi staf klien yang ingin melaporkan adanya pelanggaran etika tanpa takut akan sanksi dari atasan.			
2.	Seluruh tim audit diwajibkan melakukan rotasi staf secara berkala untuk klien yang sama guna menghindari ancaman kedekatan			

		(<i>familiarity threat</i>).			
	3.	Penilaian kepatuhan terhadap kode etik dilakukan secara terdokumentasi dan menjadi bagian dari penilaian kinerja tahunan.			
Bagian C: Penerimaan dan Keberlanjutan Klien					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Sebelum menerima klien baru, KAP melakukan prosedur <i>Due Diligence</i> untuk memastikan klien tidak terlibat dalam praktik kecurangan laporan keuangan.			
	2.	KAP bersedia menolak perikatan jika kompetensi staf yang tersedia tidak memadai untuk menangani kompleksitas industri klien tersebut.			
	3.	Terdapat evaluasi tertulis setiap tahun untuk memutuskan apakah hubungan dengan klien lama layak dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan kepatuhan klien terhadap saran auditor.			
	4.	Surat Perikatan (<i>Engagement Letter</i>) mencantumkan secara detail Batasan tanggung jawab manajemen klien untuk menghindari risiko hukum bagi KAP.			

Bagian D: Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Proses rekrutmen staf auditor di KAP Dian Utami memiliki standar kompetensi teknis. dan integritas yang ketat.			
2.	Setiap auditor memiliki target jam pelatihan profesional berkelanjutan (PPL) yang wajib dipenuhi setiap tahun.			
3.	Beban kerja (jumlah klien per tim) dipantau secara ketat agar auditor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman bukti audit secara detail.			
4.	Terdapat jalur karir yang jelas didasarkan pada kompetensi teknis dan kepatuhan pada standar mutu.			

Bagian E: Pelaksanaan Perikatan & Supervisi

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Penggunaan Kertas Kerja (KKA) terstandarisasi wajib digunakan untuk menjamin konsistensi di seluruh tim audit.			
2.	Auditor Senior melakukan review atas pekerjaan staf secara <i>real-time</i>			

		(saat audit berlangsung), bukan hanya saat laporan akan diterbitkan.			
	3.	Setiap perbedaan pendapat teknis di dalam tim audit didokumentasikan dan diselesaikan melalui konsultasi formal dengan Partner.			
	4.	Seluruh dokumen audit (KKA) diarsipkan dan dikunci secara permanen dalam jangka waktu maksimal 60 hari setelah laporan audit diterbitkan.			
Bagian F: Pemantauan (Monitoring) & Remediasi					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	KAP melakukan inspeksi mendalam setidaknya setahun sekali terhadap minimal satu perikatan yang sudah selesai untuk setiap partner.			
	2.	Hasil dari temuan pemantauan internal dikomunikasikan kepada seluruh staf sebagai materi pembelajaran agar kesalahan tidak terulang.			
	3.	KAP memiliki prosedur formal untuk menindaklanjuti keluhan atau tuntutan dari hal terkait kegagalan audit.			
	4.	Tindakan perbaikan (remediasi) seperti revisi SOP dilakukan segera			

		setelah menemukan adanya celah dalam sistem pengendalian mutu.			
--	--	--	--	--	--

B. Kualitas Audit

Bagian A: Kompetensi Auditor					
No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan	
1.	Auditor memiliki pengetahuan teknis mengenai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.				
2.	Personel audit memenuhi jam minimum Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IAPI.				
3.	Auditor memiliki pengalaman yang cukup pada bidang industri klien untuk dapat mengidentifikasi risiko bisnis yang berdampak pada laporan keuangan.				
Bagian B: Etika dan Independensi Auditor					
No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan	
1.	Auditor secara konsisten mematuhi prinsip dasar etika profesi (integritas, objektivitas,				

		kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional).			
	2.	Terdapat prosedur untuk memastikan tidak adanya kepentingan keuangan atau hubungan keluarga antara tim audit dengan pihak klien.			
	3.	Auditor memiliki keberanian untuk mempertahankan opini yang benar meskipun menghadapi tekanan dari manajemen klien.			
Bagian C: Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Rekan Perikatan (Partner) terlibat secara memadai dalam tahap perencanaan audit untuk memberikan arahan strategis kepada tim.			
	2.	Audit Manajer mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan review atas pekerjaan staf selama proses audit berlangsung.			
	3.	Auditor memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi mengenai masalah akuntansi yang kompleks dengan tim perikatan.			
Bagian D: Pengendalian Mutu Perikatan					

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Pelaksanaan Audit didukung oleh ketersediaan metodologi audit dan perangkat lunak (<i>software</i>) yang mutakhir.			
2.	Prosedur konsultasi dilakukan secara formal apabila ditemukan perbedaan pendapat teknis dalam audit.			
3.	Penelaahan Mutu Perikatan (<i>Engagement Quality Control Review</i>) dilakukan dengan objektif sebelum laporan audit diterbitkan.			

Bagian E: Hasil Review Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Hasil temuan dari inspeksi internal (pemantauan) digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki prosedur audit di waktu yang akan datang.			
2.	KAP menindaklanjuti rekomendasi dari hasil revidi mutu eksternal (misalnya oleh PPPK atau IAPI) untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.			
3.	Tingkat kesalahan atau kekurangan dalam kertas kerja audit menurun setelah adanya evaluasi periodik			

		dari bagian pengendalian mutu.			
Bagian F: Rentang Kendali Perikatan					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Jumlah staf auditor dalam satu perikatan berada dalam jumlah yang ideal terhadap manajer dan partner.			
	2.	Beban kerja staf auditor (jumlah klien yang ditangani) dipantau agar tidak melampaui batas kemampuan kerja yang efektif.			
	3.	Audit Supervisor mampu melakukan supervisi secara mendalam kepada setiap anggota tim karena jumlah staf yang dikelola masih dalam batas wajar.			
Bagian G: Organisasi dan Tata Kelola KAP					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Struktur organisasi KAP mendukung terciptanya budaya kerja yang mengutamakan kualitas.			
	2.	Sistem penilaian kinerja auditor tidak hanya didasarkan pada target jumlah klien, tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap standar audit.			

	3.	KAP menyediakan sumber daya yang cukup (fisik dan teknologi) untuk mendukung kelancaran operasional audit.			
Bagian H: Kebijakan Imbalan Jasa					
	No.	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
	1.	Penentuan besaran imbalan jasa (<i>audit fee</i>) mempertimbangkan risiko audit dan tingkat kerumitan bisnis klien.			
	2.	Imbalan jasa yang diterima memastikan KAP dapat menugaskan staf Auditor dengan kompetensi yang sesuai saat melakukan prosedur audit.			
	3.	Kebijakan <i>fee audit</i> diatur sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan tekanan yang dapat merusak kualitas hasil audit.			

Dokumentasi Wawancara

